



RELASI PEMERINTAH DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PROGRAM PELATIHAN ANAK JALANAN

**(STUDI PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

TRI WAHYU CAHYONO

0710310118



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2011

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam
Program Pelatihan Anak Jalanan (Studi Pada Dinas
Ketenagakerjaan dan sosial Kota Malang)

Disusun oleh : Tri Wahyu Cahyono

NIM : 0710310118

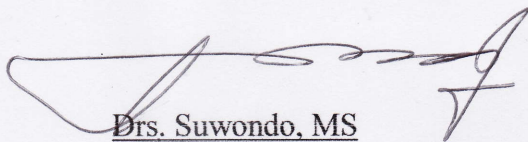
Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, Juli 2011

Komisi Pembimbing

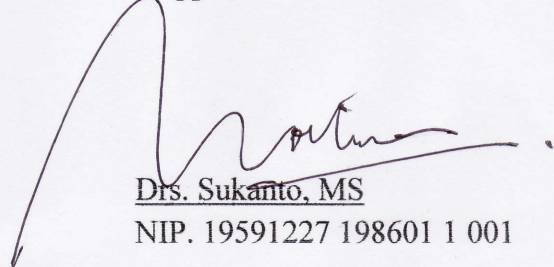
Ketua



Drs. Suwondo, MS

NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota



Drs. Sukanto, MS

NIP. 19591227 198601 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

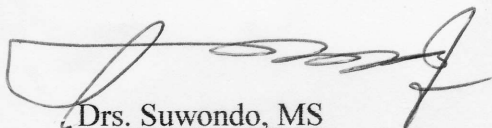
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Juli 2011
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Tri Wahyu Cahyono
Judul : Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan dan sosial Kota Malang)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

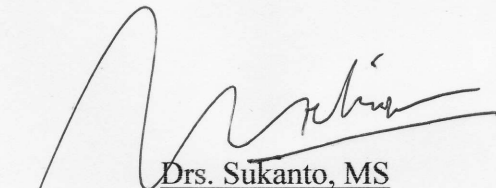
Ketua



Drs. Suwondo, MS

NIP. 19530201 198010 1 001

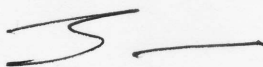
Anggota



Drs. Sukanto, MS

NIP. 19591227 198601 1 001

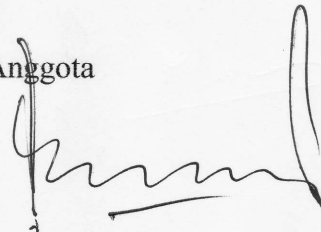
Anggota



Dr. Sarwono, M.Si

NIP. 19570909 198403 1 002

Anggota



Drs. Aspan Munadi, MAP

NIP. 19460827 197302 1 001

RINGKASAN

Tri Wahyu Cahyono, 2011, **Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan**, Komisi Pembimbing, Ketua: Drs. Suwondo, MS, Anggota: Drs. Sukanto, MS, 152 Hal + xviii

Pemandangan yang acap kali kita temui di jalanan besar Kota Malang, beberapa anak usia sekolah yang meminta-minta, berjualan koran, mengamen atau bercanda dengan kawan-kawannya. Mereka inilah yang disebut anak jalanan. Implementasi program melalui penanganan permasalahan anak jalanan sudah dilakukan. Upaya pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang membuat program pelatihan anak jalanan dalam upaya membina anak jalanan yang dilakukan pada tahun 2010. Dalam penanganan anak jalanan diperlukan dukungan dari berbagai sektor, khususnya LSM dibidang pemberdayaan anak jalanan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan skripsi ini adalah Bagaimana pola relasi (hubungan) antara pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelatihan anak jalanan di Kota Malang dan Bagaimana program pelatihan anak jalanan di Kota Malang. Dengan Tujuan untuk mengetahui pola relasi (hubungan) antara pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelatihan anak jalanan di Kota Malang dan mengetahui program pelatihan anak jalanan di Kota Malang. Adapun manfaatnya digunakan untuk memperkuat kebenaran teori dan memberikan kontribusi untuk evaluasi terhadap pembinaan anak jalanan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori seperti Administrasi Publik, Pergeseran Administrasi Publik, Relasi Pemerintah Dengan LSM, Konsep Kemitraan, Hubungan Tiga Dimensi Kemitraan, Konsep Anak Jalanan Dan Karakteristiknya, pelatihan Anak Jalanan, dan Kedudukan LSM Dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan fokus penelitiannya adalah Relasi Pemerintah Dengan LSM dengan subfokus Peran Pemerintah dalam pembinaan anak jalanan, Peran LSM dalam pembinaan anak jalanan, Pola Relasi Pemerintah dengan LSM dan Pelatihan anak jalanan dengan subfokus Proses Perencanaan Program Pelatihan Anak Jalanan, Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan, Hasil Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan. Lokasi penelitian di Kota Malang sedangkan situs penelitiannya yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang serta LSM Griya Baca. Sumber datanya terdiri dari data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan metode miles dan Hubberman.

Penelitian ini membahas tentang relasi pemerintah dengan LSM melalui Peran pemerintah dan LSM dalam pembinaan anak jalanan, dan Konteks pola



relasi yang terjadi antara pemerintah dengan LSM, serta pelatihan anak jalanan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program pelatihan anak jalanan.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Peran pemerintah dalam pembinaan anak jalanan berpedoman pada UUD 1945 serta UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah bukan merupakan salah satu aktor saja. Disini diperlukan peran LSM. Konteks pola relasi yang terjadi antara pemerintah dengan LSM bersifat *collaboration/cooperation*. dalam program pelatihan terdapat tahap perencanaan terdiri dari mengidentifikasi pelatihan, merumuskan tujuan pelatihan, menentukan peserta didik, dan mendesain program pelatihan. Dalam proses pelaksanaan pelatihan anak jalanan umumnya menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan metode Tanya jawab. Hasil pelaksanaan program pelatihan anak jalanan mendapati bahwa untuk semua pelatihan peserta didik lulus pelatihan. Saran untuk penelitian ini yaitu pelatihan-pelatihan tidak hanya ditujukan kepada para pengurus Lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak jalanan saja tetapi mereka harus bisa mendirikan suatu sarana prasarana dan fasilitas sendiri dalam melakukan pelatihan. LSM disini harus lebih berperan serta dalam program-program yang dibuat oleh pemerintah dan perlunya sosialisasi ke masyarakat umum agar mereka tahu dan tidak memandang anak jalanan itu dengan sebelah mata dan menganggap mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : relasi, anak jalanan, pelatihan

SUMMARY

Tri Wahyu Cahyono, 2011, **The Relations Between Government and Non-Governmental Organization (NGO) In The Training Program of Street Children**, Supervisor: Drs. Suwondo, MS, Co-Supervisor: Drs. Sukanto, MS, 152 Page + xvii

Sometimes we see on the street of Malang City, several poor boys, paper boy or street musician are playing with their friends. They called anak jalanan. The implementation by finding the solution of anak jalanan problems has been done. The effort of Malang government by Department of Employment and Social office makes training programs for anak jalanan to make them have some skill in 2010. In handling of anak jalanan needs support of various sectors, specially in NonGovernmental Organization anak jalanan empowerment field that explained in law No. 23 year 2002 about children's protection. The problem in this minithesis is how the relation between NGO and government in training of anak jalanan in malang. And how is the training program in malang. With purposes to know how the relation between NGO and government in training of anak jalanan in malang. And how is the training program in malang. And the benefits are use to reinforce the theory and make some contribution in evaluation of steer children's training.

In this research using theories just like public administration, displacement of public administration, the relation between NGO and government, the concept of partnership, relation 3 dimentions of partnership, concept, characteristic of anak jalanan, and the position of the NGO in the anak jalanan's training effort.

The researcher using descriptive, Method and qualitative approach and the focus are the relation between NGO and government, government's effort in training of anak jalanan. The pattern of relation between NGO and government in training of anak jalanan. Implementation program of anak jalanan's training. The result of the program. And the location is in malang and the site are in Department of Employment and social Malang City, Sanggar Kegiatan Belajar Malang City and NGO "Griya Baca". The data source consist of primary and secondary. The data gathering technic by interview, observation and documents study. The analysis method using miles dan Hubberman.

This research discussed about the relation between NGO and government in training of anak jalanan, and the pattern of relation between NGO and government in training of anak jalanan, also the planning process, implementation and the result training of anak jalanan.

From this research concluded that government's effort in the training program based on Constitutions 1945 and Law No. 11 year 2009 about social welfare. Government is not the only actor in this program and it needs NGO. The implementation of the program basicly by talk and ask to them. The result of this



program of all Student passed. The researcher's suggestion are not only for the person who concern about , but they have to build some infrastructure which more usefull in this program. NGO have to be more active in this program which made by government and also to know how important socialization to the public about the image of as bad person in social life.

Keywords: relation, anak jalanan, training



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, khususnya orang tua.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat untuk menulis
2. Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Dr. Khairul Muluk, M.Si, S.Sos, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
4. Drs. Suwondo, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing
5. Drs. Sukanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing
6. Dra Pipih Triastuti, selaku Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang
7. Teman-teman publik 2007 serta teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungannya
8. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.



Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 28 Juni 2011

Tri Wahyu Cahyono

0710310118



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN

SUMMARY

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kontribusi Penelitian

E. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

B. Pergeseran Administrasi Publik

1. Administrasi Publik Model Klasik

2. *New Publik Management* (NPM)

3. *Good Governance*

C. Relasi Pemerintah Dengan LSM

1. Otonomi (*Autonomous/Benign Neglect*)

2. Fasilitas/Promosi (*Facilitation/Promotion*)

3. Kolaborasi/Kerjasama (*Collaboration/Cooperation*)

4. Kooptasi (*Cooptation/Absorption*)

5. Pembubaran (*Containment/Sabotage/Dissolution*)

D. Konsep Kemitraan

E. Hubungan Tiga Dimensi Kemitraan

F. Konsep Anak Jalanan Dan Karakteristiknya

G. Pelatihan Anak Jalanan

1. Pengertian Pelatihan

2. Tujuan Pelatihan

3. Manfaat Pelatihan

4. Perencanaan Pelatihan

5. Pelaksanaan Pelatihan

H. Kedudukan LSM Dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan



BAB III METODE PENELITIAN 59

A. Jenis Penelitian	59
B. Fokus Penelitian	60
C. Lokasi dan Situs penelitian	61
D. Sumber data	62
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Metode Analisis	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69

A. Hasil Penelitian	69
1. Gambaran Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang	69
(a) Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang	70
(b) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang	71
(c) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang	72
(d) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang	73
2. Gambaran Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan “Griya Baca”	83
(a) Sejarah Lembaga	83
(b) Visi dan Misi Lembaga	84
(c) Nama dan Motto Lembaga	85
(d) Fungsi dan Tujuan Lembaga	86
3. Gambaran Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang	87
(a) Dasar Pendirian SKB	87
(b) Sejarah SKB Kota Malang	90
(c) Visi dan Misi SKB Kota Malang	90
(d) Fasilitas SKB Kota Malang	91
(e) Program SKB Kota Malang	92
(f) Struktur Organisasi SKB Kota Malang	92
4. Gambaran Program Pelatihan Anak Jalanan	93
5. Relasi Pemerintah Dengan LSM	97
(a) Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan	97
(b) Peran LSM Dalam Pembinaan Anak Jalanan	100
(c) Pola Relasi Pemerintah dengan LSM dalam Program Pelatihan Anak Jalanan	101
6. Program Pelatihan Anak Jalanan	104
(a) Proses Perencanaan Program Pelatihan Anak Jalanan	104
(b) Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan	107
(c) Hasil Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan	111
B. Pembahasan	114
1. Relasi Pemerintah Dengan LSM	114
(a) Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan	115
(b) Peran LSM Dalam Pembinaan Anak Jalanan	120



(c) Pola Relasi Pemerintah dengan LSM dalam Program Pelatihan Anak Jalanan.....	123
2. Program Pelatihan Anak Jalanan	129
(a) Proses Perencanaan Program Pelatihan Anak Jalanan	130
(b) Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan.....	133
(c) Hasil Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan.....	135

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 138

A. Kesimpulan	138
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA..... 142



DAFTAR TABEL

Tabel		Hal.
1	Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Kota Malang	3
2	Fitur yang membedakan <i>governance</i> dari <i>government</i>	20
3	Model Kompetisi Paradigma <i>Governance</i>	23
4	Model-Model LSM	34
5	Kegiatan dan Indikator Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang	99
6	Laporan Pelatihan Otomotif, Elektronika dan Mengemudi	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Interaksi Antar Aktor Dalam <i>Good Governance</i>	24
2	Proses Analisis Data Miles dan Hubberman	68
3	Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang	70
4	Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang	72
5	Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang	92
6	Alur Pola Relasi	127
7	Proporsi Peran Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan	129



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Surat Pengantar Penelitian
- 2 Surat Pengantar Penelitian
- 3 Surat Izin Penelitian
- 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- 5 Dokumentasi Pelatihan
- 6 Curriculum Vitae

Hal.

- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 152



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang adalah salah satu kota besar di Indonesia, merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Kota Malang berada di Provinsi Jawa Timur, segala aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya berada disini. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang di seluruh dunia, Malang juga merasakan fenomena yang serupa. Perkembangan pesat, seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya tak pelak mendorong para urban untuk mengadu nasib. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di kota ini. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung akan berpeluang menjadi gelandangan atau pengemis. Mereka yang belum beruntung ini contohnya adalah beberapa anak usia sekolah yang meminta-minta, berjualan koran, mengamen atau bercanda dengan kawan-kawannya. Sebuah pemandangan yang sering kali ditemukan di jalanan besar Kota Malang. Mereka inilah yang disebut anak jalanan.

Secara khusus, anak jalanan menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktifitas lain. Odi Solahudin (2000:5) dalam penelitiannya mendefinisikan bahwa Anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya



di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya.

Data rekapitulasi kementerian Sosial tahun 2007 bahwa Provinsi dengan jumlah anak jalanan terbanyak berturut-turut adalah Jawa Timur, yaitu sebanyak 13.136 anak, Nusa Tenggara Barat 12.307 anak, dan Nusa Tenggara Timur 11.889 anak. Sedangkan 3 propinsi dengan jumlah anak jalanan paling sedikit berturut-turut adalah Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kepulauan Riau. Ini menunjukkan bahwa provinsi Jawa Timur pemasok terbesar anak jalanan di Indonesia dan kota Malang merupakan salah satu pemasoknya. Data rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan provinsi Jawa Timur tahun 2007 menunjukkan sekitar 279 orang anak jalan yang ada di Kota Malang dan masih banyak yang belum terdata.

Dapat dilihat dari table berikut ini :



Tabel 1

Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Kota Malang

No.	Uraian	Orang
1.	Anak Balita Terlantar	0
2.	Anak terlantar	681
3.	Anak yang menjadi Korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah	0
4.	Anak Nakal	69
5.	Anak Jalanan	279
6.	Anak Cacat	364
7.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2400
8.	Wanita yang menjadi Korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah	28
9.	Lanjut Usia Terlantar	813
10.	Lanjut usia yang menjadi Korban tindakan Kekerasan atau diperlakukan Salah	0
11.	Penyandang Cacat	787
12.	Penyandang cacat bekas Penderita Penyakit kronis	23
13.	Tuna Susila	
14.	Pengemis	11
15.	Gelandangan	0
16.	Gelandangan Psikotik	0
17.	Bekas narapidana	296
18.	Korban Penyalahgunaan Napza	93
19.	Keluarga Miskin	147
20.	Keluarga rumah tak layak huni	1536
21.	Keluarga bermasalah sosial psikologi	0
22.	Komunitas adat terpecil	0
23.	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	72
24.	Korban bencana alam	99
25.	Korban bencana Sosial/pengungsi	0
26.	Pekerja Migran terlantar	0
27.	Pengidap HIV/AIDS	0
28.	Keluarga Rentan	0

Sumber : Data PMKS 2007 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Anak jalanan muncul karena ketimpangan struktur penduduk, dimana usia muda jumlahnya banyak, sedangkan tingkat kesejahteraan mereka masih minim sekali. Juga, kehadiran anak jalanan tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya, pendidikan, dan psikologis (Fanggidae, 1993:116).



Hingga saat ini banyak yang meyakini bahwa kemiskinan adalah faktor utama anak-anak pergi ke jalanan atau menjadi pekerja. Pada keluarga miskin, ketika kelangsungan hidup keluarga terancam, seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak dikerahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Menurut Tata Sudrajat dalam Wahyu Nurhajadmo (1999:15) ada tiga penyebab munculnya fenomena anak jalanan yakni:

1. Tingkat mikro (*immediate causes*), yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi anak dan keluarganya.
2. Tingkat meso (*underlying causes*), yakni faktor-faktor yang ada di masyarakat tempat anak dan keluarga berada.
3. Tingkat makro (*basic causes*), yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan struktur makro dari masyarakat seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Faktor –faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan berdasar alasan dan penuturan anak (Solahudin, 2000: 11) antara lain:

1. Kekerasan dalam keluarga
2. Dorongan keluarga
3. Impian kebebasan
4. Ingin memiliki uang sendiri
5. Pengaruh teman

Karena sebagian atau seluruh waktu anak jalanan dihabiskan di jalan, mereka rentan terhadap kejahatan baik berupa kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Kekerasan yang terjadi pada mereka dan segala bentuk eksploitasi harus mereka hadapi disamping mereka harus mencari makan, mereka juga harus melindungi diri dari ancaman yang ada di jalanan.

Kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik yang berupa pukulan, penganiayaan, menampar, meludahi dan sebagainya. Kekerasan mental yang berupa celaan, menghina, menakuti, mengancam, berkata kasar dan sebagainya,



dan kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), pelecehan seksual dan sebagainya. Disamping kekerasan yang akan anak jalanan hadapi, mereka juga rentan terhadap kemungkinan perdagangan anak. Mereka diperdagangkan untuk dieksploitasi secara seksual. Kalau sudah demikian, maka anak-anak inipun akan rentan pula terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/Aids.

Menurut UUD 1945, Pasal 32 ayat 2 menyebutkan “Negara mengembangkan sistem jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”.

Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemberdayaan anak jalanan karena anak jalanan termasuk masyarakat Indonesia.

Hak asasi anak jalanan pada hakekatnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Konvensi tentang hak-hak Anak. Mereka perlu mendapatkan haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Implementasi program melalui penanganan permasalahan anak jalanan sudah dilakukan. Upaya pemerintah sejak tahun 1995 sampai sekarang dikembangkan model-model penanganan anak jalanan. (DINSOS Prop. Jawa



Timur, 2003:1). Upaya pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang membuat program pelatihan anak jalanan dalam upaya membina anak jalanan yang dilakukan pada tahun 2010. Program pelatihan ini bertujuan untuk melatih anak jalanan agar mempunyai keterampilan lebih sehingga bisa sedikit demi sedikit tidak menggantungkan nasibnya di jalan dan mempunyai pekerjaan yang layak. Program pelatihan ini bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Malang bentuk upaya membina anak jalanan ke arah yang lebih baik.

Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan LSM terhadap anak jalanan juga diketahui masih terdapat *image negatif* yang muncul dikalangan masyarakat yakni terkesan tidak berhasil, tidak terfokus, tidak serius dan hanya akan menghabiskan anggaran negara. Selain itu dalam pembinaan anak jalanan selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri tidak terjalin jaringan kerja yang baik apalagi kuat antar berbagai pihak.

Dalam penanganan anak jalanan diperlukan dukungan dari berbagai sektor, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak maka perlu peran beberapa pihak, yaitu : (1) Lembaga Perlindungan Anak (LPA), (2) Lembaga Keagamaan, (3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (4) Organisasi Kemasyarakatan (termasuk LBH), (5) Organisasi Sosial, (6) Dunia Usaha, (7) Media Massa, atau (8) Lembaga Pendidikan. Jika terjadi suatu komitmen antar lintas sektor ini diprediksi akan sangat membantu proses keberhasilan penanganan anak jalanan.



Yang menjadi persoalan sekarang bagaimana relasi pemerintah dan LSM dalam pembinaan anak jalanan melalui program pelatihan anak jalanan sehingga anak-anak jalanan bisa dibina dengan baik dan tidak lagi kembali ke jalan untuk mencari nafkah. Serta bagaimana *format* program pelatihan anak jalanan sebagai upaya pembinaan anak jalanan. Dari latar belakang yang dijelaskan di atas peneliti mengambil judul “**Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Program Pelatihan Anak Jalanan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pola relasi antara pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam program pelatihan anak jalanan di Kota Malang?
2. Bagaimanakah program pelatihan anak jalanan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola relasi (hubungan) antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam program pelatihan anak jalanan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui program pelatihan anak jalanan di Kota Malang.



D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi yang terbagi menjadi dua, yakni kontribusi yang bersifat teoritik dan bersifat praktis.

1. Kontribusi Teoritik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat kebenaran teori yang telah ada tentang relasi antara pemerintah dengan LSM dalam program pelatihan anak jalanan sebagai bentuk Pembinaan Anak Jalanan dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian serupa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk evaluasi terhadap pembinaan anak jalanan, sebagai pembandingan dengan pembinaan yang diterapkan selama ini oleh pemerintah. Dapat memberikan solusi dalam mencari pengembangan pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan anak jalanan. Dengan demikian hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk masukan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang maupun LSM yang menangani anak jalanan, yang lebih penting lagi bahwa penelitian ini dapat berfungsi bagi sasaran untuk anak jalanan itu sendiri dalam upaya menuju masa depan yang lebih baik dengan penuh percaya diri serta memiliki kemandirian yang utuh sebagai generasi penerus bangsa.



E. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini merupakan gambaran singkat mengenai isi skripsi.

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi.

1. Bagian Pendahuluan Skripsi

Bagian ini terdiri dari halaman judul, motto dan persembahan, tanda pengesahan, pernyataan orisinalitas skripsi, ringkasan, *summary*, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.

Bagian ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi.

2. Bagian isi Skripsi

Bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu : pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup.

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan kontribusi penelitian, sistematika skripsi. Kegunaan pendahuluan skripsi ini adalah mengantarkan pembaca untuk memahami gambaran tentang topik yang akan dibahas.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang melandasi pola pikir penulis dalam menyusun skripsi. Landasan teori digunakan sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan digunakan sebagai pegangan dalam melakukan penelitian, serta kerangka berpikir.



Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Suatu pernyataan mengenai penerapan hasil penelitian sehingga akan membantu pembaca, untuk mengetahui sejauh mana hasil-hasilnya dapat diterapkan dalam praktik.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan dari peneliti untuk perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti dapat juga mengemukakan persoalan-persoalan baru yang muncul dari penelitian tersebut untuk dijadikan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Kata Administrasi berasal dari kata *administrare* (latin: ad = pada, ministrare = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Kata administrasi juga berasal dari kata “*administration*” (to administer). Kata to administer dapat berarti to manage (mengelola) dan to direct (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Kata administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup *stelselmataige verkrijging en verwerking van gegeeven* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen. Dengan berkembangnya administrasi sebagai cabang ilmu tersendiri, pengertian administrasi juga ikut berkembang mulai dari yang memandang administrasi sebagai usaha, manajemen proses sampai pada pemerintahan. (Syamsiar, 2006:1-2)

Kata publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*public*”. Dalam Kamus Besar Indonesia Pustaka (2001), publik diartikan, orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebagainya). Rando dalam syamsiar (2006:111) mengartikan kata “*public*” sebagai: “*pertaining to, or affecting a population or a community as a whole, open to all person, owned by community, performed on behalf of a community, serving a community as an official.*”



Administrasi publik, menurut Chander dan Plano dalam Keban (2008:3), adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelolah (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Mc Curdy dalam Keban (2008:3) dalam studinya literaturnya mengemukakan sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dewasa ini administrasi publik dianggap sebagai manajemen, L.F.Keller dalam Keban (2008:4) melihat administrasi publik sebagai *a system of management for complex public administration*. Owen Hughes dalam Keban (2008:5) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi akademik tentang sektor publik.

Dalam buku teks yang ditulis oleh Nicholas Henry dalam Keban (2008:5) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur berikut:

1. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan public dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Sementara itu buku yang ditulis oleh shafritz dan Russel dalam Keban (2008:6) menggambarkan unsur-unsur berikut:

1. Lingkungan politik
2. Penerapan lebih lanjut dari ajaran *reinventing government*
3. Hubungan antar kelembagaan pemerintah
4. Perkembangan teori manajemen dan organisasi
5. Perilaku organisasi
6. Managerialisme dan manajemen kinerja
7. Manajemen strategis di sektor publik



8. Kepemimpinan dan akuntabilitas
9. Manajemen personalia dan hubungan kerja
10. Keadilan sosial
11. Manajemen keuangan
12. *Auditing, akunting* dan evaluasi
13. Penghargaan dan etika

13

Unsur-unsur yang ada di atas merupakan suatu penjabaran ruang lingkup dari administrasi publik yang harus dilakukan oleh administrasi publik itu sendiri.

Unsur-unsur administrasi publik tersebut merupakan sebagian dari unsur-unsur yang dijabarkan oleh pakar ilmuwan di bidang administrasi publik.

Administrasi memiliki peran yang sangat penting dan vital dalam suatu negara. Karl Polanyi dalam Keban (2008:15) berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik. Frederick

A.Cleveland justru menunjukkan peran administrasi publik sangat vital dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Katanya, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya.

Rondinelli dalam Keban (2008:16) mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan kepada melayani masyarakat agar menjadi *democratic government*. Dalam hal ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik dan swasta.



B. Pergeseran Administrasi Publik

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di manapun, Administrasi Publik akan memainkan sejumlah peran penting diantaranya dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya Negara yakni kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia misalnya, tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perjalanan penyelenggaraan peran Administrasi Publik yang demikian, telah mengalami berbagai macam perkembangan dimulai pada masa sebelum lahirnya konsep Negara Bangsa hingga lahirnya ilmu modern dari Administrasi Publik yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma, mulai dari model klasik yang berkembang dalam kurun waktu 1855/1887 hingga akhir 1980an; *New Public Management* (NPM) yang berkembang dalam kurun waktu akhir 1980an hingga pertengahan 1990an; sampai kepada *Good Governance* yang berkembang sejak pertengahan 1990an hingga saat ini.

Pergeseran paradigma Administrasi Publik tersebut, telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan peran Administrasi Publik khususnya terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi; pengelolaan organisasi secara internal; serta interaksi antara Administrasi Publik dengan politisi, masyarakat dan aktor lainnya. Implikasi yang demikian tentu saja pada akhirnya akan sangat menentukan corak dan ragam dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari sebuah Negara. Corak dan ragam tersebut akan sangat



ditentukan oleh kondisi lokal yang ada di Negara tersebut, dalam artian sejauhmana Administrasi Publik di Negara tersebut telah menyesuaikan diri dengan perkembangan paradigma yang ada serta sejauh mana penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal dan permasalahan yang ada di Negara tersebut.

1. Administrasi Publik Model Klasik

Dalam pandangan klasik, Administrasi Publik seringkali dilihat sebagai seperangkat Institusi Negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta praktek dan perilaku untuk mengelola urusan-urusan publik dalam rangka melayani kepentingan publik. Sebagai organisasi birokrasi, Administrasi Publik menurut bekerja melalui seperangkat aturan dengan legitimasi, delegasi, kewenangan rasional-legal, keahlian, tidak berat sebelah, terus menerus, cepat dan akurat, dapat diprediksi, memiliki standar, integritas dan profesionalisme dalam rangka memuaskan kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, Administrasi Publik sebagai sebuah instrumen Negara diharapkan untuk menyediakan basis fundamental bagi perkembangan manusia dan rasa aman, termasuk di dalamnya kebebasan individu, perlindungan akan kehidupan dan kepemilikan, keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, stabilitas, dan resolusi konflik secara damai baik dalam mengalokasikan atau mendistribusikan sumberdaya maupun dalam hal-hal lainnya. Dengan kata lain, Administrasi Negara yang efektif harus ada untuk menjamin keberlanjutan aturan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa Administrasi Publik model klasik ini cenderung menggunakan pendekatan yang legalistik. Paradigma Administrasi Publik model



klasik juga dapat dilihat melalui model “old chesnuts” dari Peters dalam Kurniawan (2004:1) dimana Administrasi Publik berdasarkan pada Pegawai Negeri yang politis dan terinstitusionalisasi; organisasi yang hirarkhis dan berdasarkan peraturan; penugasan yang permanen dan stabil; banyaknya pengaturan internal; serta menghasilkan keluaran yang seragam.

Dalam model klasik, tugas kunci dari pemerintah menurut Stoker dalam Kurniawan (2004:2) adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik, seperti membangun dengan lebih baik sekolah, rumah, saluran pembuangan serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politisi. Dalam menyediakan pelayanan yang demikian, Administrasi Publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama dan membiayainya dari hasil pemungutan pajak dan penggunaan dana-dana pemerintah lainnya. Karenanya menurut Stoker, dominasi yang demikian dapat membuat penyediaan pelayanan tersebut menjadi tidak efisien khususnya apabila terjadi kesenjangan sumberdaya dan kapasitas dari Administrasi Publik yang menyebabkan institusi Administrasi Publik menjadi tidak efektif. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kritik terhadap Administrasi Publik model klasik.

2. *New Publik Management (NPM)*

NPM dianggap telah banyak berbuat untuk menggoyang organisasi publik yang tidur dan melayani dirinya sendiri melalui penggunaan ide-ide dari sektor privat (Oluwu dalam Kurniawan, 2004:9). NPM menyediakan banyak pilihan untuk mencoba mencapai biaya yang efektif dalam penyampaian barang



publik seperti adanya organisasi yang terpisah untuk kebijakan dan implementasi, kontrak kinerja, pasar internal, sub kontrak dan metode lainnya (Oluwu dalam Kurniawan, 2004:10). NPM memiliki fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya. NPM berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat. Terdapat sejumlah prinsip dasar dari NPM berdasarkan pendapat dari sejumlah ahli sebagaimana uraian berikut (Hoods dan Owens serta Borins and Warrington dalam Kurniawan, 2004:14):

- a. Penanganan oleh manajemen profesional.
Artinya, biarlah manajer yang mengelola. Prinsip ini memperkenalkan akan adanya kebutuhan bagi pengelolaan yang profesional di tingkat atas, dan manajer profesional ini harus diberikan kewenangan yang besar dalam mengelola daripada hanya sekedar menjadi administrator yang fungsinya hanya mengadministrasikan aturan. Jika memungkinkan, posisi dari manajer ini harus berdasarkan kontrak khususnya untuk mampu memberikan jawaban terhadap hasil-hasil tertentu yang ditentukan secara politis. Pola kontrak yang semacam ini membawa perubahan yang mendasar dalam pengorganisasian manajemen sumberdaya manusia di sektor publik.
- b. Keberadaan standar dan ukuran kinerja.
Salah satu perangkat penting dalam mengimplementasikan manajemen profesional adalah melalui pendefinisian secara jelas terhadap tujuan, target dan indikator keberhasilan. Lebih disukai dalam bentuk kuantitatif serta pembenaran berdasarkan akuntabilitas yang lebih besar terhadap penggunaan sumberdaya.
- c. Penekanan pada pengawasan keluaran dan manajemen wirausaha.
Hal ini dilakukan melalui mekanisme kinerja dan anggaran berdasarkan program serta melalui perencanaan jangka panjang dan penggunaan manajemen strategik pada organisasi. Manajemen strategik memfokuskan pada perubahan tujuan yang harus dicapai oleh organisasi dalam situasi perubahan lingkungan yang dinamis melalui analisa SWOT.
- d. Unit yang tidak mengumpul.
Organisasi dibagi kedalam unit-unit korporasi yang terpisah dan dengan kontrak kinerja yang terpisah dengan tujuan memisahkan kebijakan dari unit operasional.
- e. Kompetisi dalam pelayanan publik.



Penerapan prinsip pasar kedalam sektor publik dilakukan melalui privatisasi, komersialisasi dan tes pasar (tender versus penyediaan oleh birokrasi). Dengan memisahkan antara penyedia (otoritas legal) dari produksi (transformasi teknis dari input menjadi output), maka rivalitas dari produsen yang berbeda dapat digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan standar.

- f. Penekanan pada gaya sektor privat dalam praktek manajemen. Idenya adalah memindahkan etika pelayanan publik dari gaya militer menjadi lebih fleksibel dalam merekrut dan memberikan penghargaan seperti evaluasi kinerja dan gaji yang sesuai kinerja.
- g. Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan. Dilakukan melalui pemotongan biaya langsung, peningkatan disiplin pekerja, pembatasan biaya keluhan serta penggunaan teknologi komunikasi dan informasi.
- h. Penekanan terhadap peran dari manajer publik dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi
- i. Mengadvokasi otonomi manajerial dengan mengurangi pengawasan peran lembaga pusat
- j. Tuntutan, pengukuran dan penghargaan terhadap kinerja individu dan organisasi.
- k. Menyadari pentingnya penyediaan sumberdaya manusia dan teknologi yang dibutuhkan manajer dalam memenuhi target kinerjanya.
- l. Menjaga penerimaan terhadap kompetisi dan wawasan yang terbuka mengenai bagaimana tujuan publik harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah.

Untuk dapat memahami *governance* dan juga *good governance*, maka terlebih dahulu kita harus dapat membedakannya dengan konsep *government* yang selama ini kita kenal dalam era klasik dan NPM. Uraian berikut mencoba untuk memberikan pemahaman terhadap ketiga terminologi tersebut.

Governance vs government

Dalam memahami perbedaan antara *governance* dan *government*, Schwab dan Kubler dalam Kurniawan (2004, 14) melihatnya dari 5 (lima) fitur dimensi berdasarkan pengamatan mereka terhadap interaksi pada sebuah



kontinuum pengaturan kebijakan antara *governance* dan *government* sebagai berikut:

- a. Dimensi aktor;
- b. Dimensi fungsi;
- c. Dimensi struktur;
- d. Dimensi konvensi dari interaksi; dan
- e. Dimensi distribusi dari kekuasaan



Tabel 2

Fitur yang membedakan *governance* dari *government*

<i>Government</i>	Dimensi	<i>Governance</i>
Peserta sangat terbatas jumlahnya Umumnya lembaga-lembaga pemerintahan	Aktor	Jumlah peserta yang besar Terdiri atas aktor publik dan privat
Sedikit jaranganya konsultasi Tidak ada kerjasama dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan Isu kebijakan menjadi luas	Fungsi	Lebih banyak konsultasi Adanya kemungkinan kerjasama dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan Isu kebijakan menjadi sempit
Batas-batas yang tertutup Batas berdasarkan kewilayaan (teritori) Keanggotaan yang tidak sukarela	Struktur	Batas-batas yang sangat terbuka Batas berdasarkan fungsi (fungsional) Keanggotaan secara sukarela
Kewenangan yang hirarkis, kepemimpinan yang terkunci Interkasi yang saling berlawanan/hubungan yang cenderung konflik Kontak-kontak informal Kerahasiaan	Konvensi dari interaksi	Konsultasi horizontal, intermobilitas Konsensus atas nilai-nilai teknokratik/hubungan kerjasama Kontak-kontak yang sangat informal Keterbukaan
Otonomi yang besar dari Negara terhadap masyarakat (organisasi yang dikendalikan/dominasi negara Tidak ada akomodasi terhadap kepentingan masyarakat oleh Negara Tidak adanya keseimbangan/simbiosis antar aktor	Distribusi dari Kekuasaan	Otonomi yang rendah dari negara terhadap masyarakat (organisasi mandiri)/dominasi negara tersebar Kepentingan masyarakat diakomodir oleh negara Adanya keseimbangan atau simbiosis antar aktor

Sumber: Schwab and Kubler dalam Kurniawan (2007:14-15)

Baik yang berasal dari sektor publik maupun privat yang terlibat dalam pengaturan sebuah kebijakan. Sementara itu, *government* dicirikan dengan sangat sedikit dan terbatasnya jumlah peserta dalam proses pengaturan kebijakan

tersebut, aktor yang terlibat pun biasanya merupakan badan-badan (lembaga) pemerintahan.

Dari dimensi fungsi, *governance* dicirikan melalui banyaknya konsultasi yang dilakukan dalam pengaturan kebijakan. Hal ini memungkinkan bagi adanya kerjasama dalam pembuatan kebijakan antara aktor-aktor yang terlibat sehingga issue-isue kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih sempit. Hal ini berbeda dengan *government* yang dicirikan dengan sedikitnya konsultasi, tidak adanya kerjasama antar aktor dalam pembuatan kebijakan yang menyebabkan luasnya issue kebijakan yang dihasilkan.

Berdasarkan dimensi struktur, *governance* dicirikan dengan adanya batas-batas yang didefinisikan secara fungsional dan sangat terbuka selain keanggotaan dari struktur yang bersifat sukarela. Batas-batas yang didefinisikan secara fungsional disini berarti pertimbangan pengaturan kebijakan didasarkan atas kebutuhan fungsional. Hal ini tidak seperti *government* yang mendefinisikan batas-batas berdasarkan kewilayahan dan bersifat tertutup selain tentu saja keanggotaannya yang tidak sukarela, artinya untuk dapat masuk sebagai struktur harus merupakan anggota dari organisasi sektor publik.

Dari dimensi konvensi interaksi, *governance* dicirikan dengan konsultasi yang sifatnya horisontal dengan pola hubungan yang bersifat kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan. Sementara itu *government* dicirikan dengan adanya hirarki kewenangan sehingga pola hubungan yang terjadi lebih banyak bersifat konflik dan dipenuhi dengan banyak kerahasiaan.

Berdasarkan dimensi distribusi kekuasaan, *governance* dicirikan dengan rendahnya dominasi negara, dipertimbangkannya kepentingan masyarakat dalam pengaturan kebijakan serta adanya keseimbangan atau simbiosis antar aktor. Sementara itu *government* dicirikan dengan adanya dominasi negara yang dalam banyak hal tidak terlalu memperhatikan kepentingan masyarakat serta tidak adanya keseimbangan antar aktor yang terlibat.

Senada dengan pandangan Schwab and Kubler diatas, Stoker dalam kurniawan (2004:16) mengemukakan 5 (lima) proposisi mengenai *governance* sebagai berikut:

- a. *Governance* merujuk kepada institusi dan aktor yang tidak hanya pemerintah
- b. *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggungjawab dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi
- c. *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif
- d. *Governance* adalah mengenai *self-governing* yang otonom dari aktor-aktor
- e. *Governance* menyadari untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.

Sejalan dengan itu, dalam konteks perkembangan Administrasi Publik dari bentuknya yang tradisional kemudian NPM dan pada akhirnya memusatkan kepada masyarakat, maka Benington dan Hartley sebagaimana dikutip Wilson (2002, 12) membandingkannya sebagaimana tabel berikut ini (Meehan, 2003, 6):



Tabel 3

Model Kompetisi Paradigma Governance

	Administrasi Publik	New Public Service	Citizen-centered governance
Konteks	Stabil	Kompetisi	Perubahan yang terus menerus
Populasi	Homogen	Atomized (terfragmentasi)	Berbeda-beda
Kebutuhan/masalah	Secara langsung, ditentukan oleh professional	Keinginan diekspresikan melalui pasar	Kompleks, berubah-ubah dan cenderung beresiko
Strategi	Memfokuskan pada negara dan produsen	Memfokuskan pada pasar dan konsumen	Ditentukan oleh masyarakat sipil
Governance melalui	Hirarkhi	Pasar	Jejaring dan kemitraan
Aktor	Aparat pemerintah	Pembeli dan penyedia; klien dan kontraktor	Kepemimpinan Masyarakat

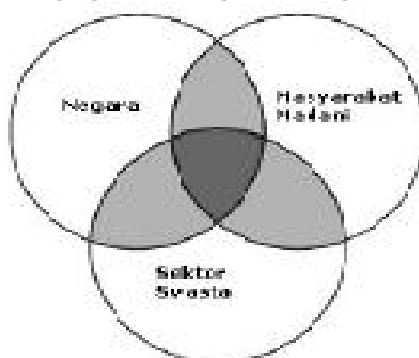
Sumber: Benington dan Hartley sebagaimana dikutip dalam Meehan dalam Teguh Kurniawan (2007:16)

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa konsep *governance* merujuk kepada sebuah proses pembuatan kebijakan dan proses dimana kebijakan tersebut dilaksanakan yang melibatkan baik negara (pemerintah), sektor privat, maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Disini dapat terlihat adanya interaksi antar ketiga aktor tersebut dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana terdapat dalam gambar berikut:



Gambar 1

Interaksi antar Aktor dalam Governance



Sumber: Teguh Kurniawan (2007:17)

Governance melibatkan tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga sektor privat dan masyarakat madani. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan.

Negara (pemerintah) berperan dalam menciptakan situasi politik dan hukum yang kondusif; sektor privat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan; dan masyarakat madani berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas, ekonomi, politik dan sosial (Tamin, 2002, 18). Dengan kata lain menurut Salomo (2002, 52-53),

birokrasi dituntut agar mempunyai karakter bersih, terbuka, akuntabel responsif, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat bagi keterlibatan dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan kontrol kebijakan; dunia usaha dituntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, moralitas tinggi, *social responsibility* dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku serta; masyarakat dituntut agar kuat, selalu menyatakan pendapatnya, berkualitas tinggi



serta partisipatif terhadap berbagai proses yang dilakukan baik oleh birokrasi maupun oleh dunia usaha. Setiap aktor tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Karenanya melalui *good governance* diharapkan terciptanya interaksi yang konstruktif dan memadai diantara para aktor tersebut.

3. *GOOD GOVERNANCE*

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar dalam *governance*, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregeldin mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Robert Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. *Good governance* mengandung arti hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (Santosa, 2008:130).



Syarat bagi terciptanya *good governance*, yang merupakan prinsip dasar, meliputi partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas.

- a. Partisipatoris: setiap pembuatan peraturan dan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
- b. *Rule of law*: harus ada perangkat hukum menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku semua warga.
- c. Transparansi: adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk public.
- d. *Responsiveness*: lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *basic needs* (kebutuhan dasar) dan HAM.
- e. Konsensus: jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
- f. Persamaan hak: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik.
- g. Efektivitas dan efisiensi: pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa kebijakan atau aturan.
- h. Akuntabilitas: suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.

Menurut *institute on Governance* (1996), sebagaimana dikutip Nisjar (1997), untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerangka kerja tim (*team work*) antarorganisasi, departemen, dan wilayah.
- b. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
- c. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerja sama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
- d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung



resiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistik dapat dikembangkan.

- e. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus kepada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (*non-partisan*)

Pada sektor publik, negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan, maka warga negara yang harus memperoleh jaminan atas hak-haknya tidak terkecuali anak jalanan. Anak jalanan harus memperoleh haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena anak jalanan juga warga negara yang butuh perlindungan serta hidup layak. Pemerintah harus berperan penting dalam penanganan anak jalanan ini. Tidak hanya pemerintah saja, sektor swasta dan masyarakat harus turut membantu dalam penanganan anak jalanan.

C. Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Kata relasi berasal dari kata “*relations*” yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Relasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hubungan atau pertalian. Sedangkan Relasi, dalam matematika, adalah hubungan antara dua elemen himpunan (<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Relasi>). Hubungan yang dijelaskan di atas bisa bersifat abstrak, dan tidak perlu memiliki arti apapun baik secara konkrit maupun secara matematis. Relasi harus dilakukan dua orang atau lebih dikarenakan relasi merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain. Relasi dapat diartikan sebagai hubungan tombal balik (*two way communication*). Relasi terjadi apabila ada kontak antara individu dengan individu, individu dengan kelompok,

dan kelompok dengan individu. Relasi digunakan sebagai proses berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan lisan maupun tulisan. Relasi juga merupakan seurutan interaksi-interaksi antara dua individu yang telah saling mengenal satu sama lain. Dalam relasi yang perlu dipertimbangkan adalah derajat keakraban dari relasi. Derajat keakraban dari relasi ini ditentukan oleh kualitas-kualitas antara lain: (1) frekuensi dan kekuatan pengaruh yang ditimbulkan oleh sebuah relasi dan seberapa sering pengaruh tersebut terjadi, (2) Keanekaragaman atau variasi pengaruh dari tingkah laku-tingkah laku yang berbeda dalam sebuah relasi (3) Lamanya relasi tersebut dialami.

Menurut Afan Gaffar (1999) relasi atau hubungan antara Pemerintah dengan LSM sama sekali tidak dapat dipisahkan. Di negara mana pun, pemerintah akan mengakui betapa besarnya peranan LSM dalam kehidupan sehari-hari. Di Filipina, pemeritahan Fidel Ramos mengharapkan agar LSM memainkan peranan yang lebih besar dalam mensukseskan program pemerintah. Di Thailand, kalangan LSM telah dimintai peranannya untuk ikut merumuskan Rencana Pembangunan Nasional yang keenam (1986-1990) dan ketujuh (1991-1995). Hal yang sama juga terjadi di Malaysia. Di Jepang, kalangan LSM bahkan telah mendapat pengakuan dunia internasional, karena kontribusi mereka dalam proses penyelenggaraan negara dan pembangunan. Tetapi hubungan antara Pemerintah dengan LSM tidak selamanya baik, karena tidak jarang pula pemerintah melihat LSM sebagai penentang program dan kebijakan pemerintah.

Bentuk sebenarnya hubungan antara Pemerintah dengan LSM dijelaskan dengan baik oleh James V. Ryke dalam Suharko (2005:44-47) menyebutkan lima



model hubungan antara pemerintah dengan LSM yang pernah dipraktikkan di berbagai negara.

1. Otonomi (*Autonomous/Benign Neglect*)

Dalam pola relasi ini pemerintah tidak menganggap LSM sebagai ancaman, karena itu membiarkan LSM bekerja secara independen dan mandiri.

Dalam ini, pemerintah menganggap inisiatif LSM tidak berbahaya dan membiarkan LSM beroperasi sebagai aktor otonom dalam pembangunan. LSM menikmati otonomi di bidang keuangan, kebijakan dan organisasional. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin menempuh “kebijakan lepas tangan” terhadap aktivitas LSM. Fisher dalam Suharko (2005:44) menyatakan bahwa pada awal 1970-an sampai awal 1980-an, banyak pemerintah yang cenderung mengabaikan eksistensi LSM. Akan tetapi ketika LSM bertambah banyak dan menjadi lebih aktif secara politik pemerintahan tidak lagi mengabaikannya mereka.

Dalam kasus lainnya, pemerintah mengambil keuntungan dari LSM tetapi tidak selalu mengontrolnya, malahan belajar dari mereka. Fisher menemukan tiga alasan di balik kebijakan itu, yaitu untuk memperkuat legitimasi pemerintah serta tujuan keamanan dan militer.

2. Fasilitas/Promosi (*Facilitation/Promotion*)

Pemerintah menganggap kegiatan LSM sebagai sesuatu yang bersifat komplementer. Pada model ini, peran LSM dilihat sebagai pelengkap bagi aktifitas pemerintah, kemudian pemerintah menciptakan kebijakan yang memberdayakan. Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung bagi



LSM untuk beroperasi. Tidak jarang pula pemerintah mendukung dengan menyediakan fasilitas dana, peraturan dan pengakuan hukum serta hal-hal yang sifatnya administratif lainnya, misalnya berupa status hukum. Pemberlakuan kebijakan yang mendukung dan koordinasi informal dan formal dengan aktivitas LSM, misalnya menghindari duplikasi. Dukungan yang bersifat organisasional diberikan pemerintah dengan memberikan pengakuan yang lebih besar atas legitimasi LSM. Sementara itu, dukungan yang berupa administratif diwujudkan dengan menciptakan forum bagi pemerintah dan LSM dalam berbagai tingkat, guna membahas secara intensif berbagai persoalan yang merupakan kepedulian bersama.

3. Kolaborasi/kerjasama (*Collaboration/Cooperation*)

Dalam model ini, pemerintah merasa mendapat keuntungan bila melibatkan LSM secara langsung. Kekuatan setiap agen dapat diarahkan menuju upaya pembangunan bersama. Kemitraan Pemerintah dengan LSM didasarkan pada model interaksi ini. LSM dan pemerintah bekerja sama dan saling belajar dalam kemitraan otonom, yang sifatnya bisa sementara atau berdasarkan basis yang sistematis. Bentuk kerja sama sering diawali oleh LSM, meskipun dalam beberapa departemen atau agen pemerintahlah yang lebih dahulu mempromosikan kerja sama tersebut. Dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan. Karena dengan bekerja sama semua potensi dapat disatukan guna mencapai satu tujuan bersama. LSM dan pemerintah berdiri pada posisi yang equal dan sejajar. Hubungan ini umumnya dilaksanakan oleh LSM-LSM



dengan ruang lingkup kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi kebijakan kerja sama dengan LSM masih jarang terjadi (Fisher, 1998:40-45). Kemitraan ini bisa berbentuk formal atau informal, terkait secara struktural ataupun operasional (Farrington dan Bebbington, 1993).

Di sisi lain, LSM cenderung menilai inisiatif pembangunan yang dimilikinya sebagai hal unik sehingga enggan mengakomodasi persyaratan pembangunan pemerintahan (Bratton, 1989). Di samping itu, LSM juga menolak berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga kerja sama sistematis antara LSM dan pemerintah bukan menjadi hal yang lazim. Kerja sama yang lazim berlangsung di tingkat proyek, baik yang diawali oleh LSM maupun oleh pemerintah. Fisher (1998:117) menyebut hubungan seperti ini sebagai “kooperasi paralel” yang sering lebih cocok untuk LSM ketimbang kolaborasi bersama di lapangan.

4. Kooptasi (*Cooptation/Absorption*)

Pada model ini, pemerintah umumnya memberlakukan kontrol atas aktifitas LSM melalui beberapa metode. Bratton (1989) menjelaskan satu kontinum control pemerintah terhadap LSM yang terdiri dari monitoring, koordinasi, kooptasi, dan pembubaran. Pemerintah biasanya menggunakan mekanisme registrasi dan laporan berkala untuk memonitor aktifitas LSM. Kooptasi adalah bagian dari kontrol pemerintah atas komunitas LSM, dan biasanya dilakukan oleh suatu agen pengawasan. Dalam konteks ini, LSM menjadi subjek dari berbagai regulasi pemerintah dimana aspek finansial, organisasional, dan kebijakan publik selalu dikontrol pemerintah. Pemerintah disini mencoba menjangkau dan mengarahkan kegiatan LSM dengan mengatur

segala aktifitas mereka. Untuk itu kalangan LSM harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Tidak jarang pemerintah melakukan kontrol secara aktif. Dalam banyak kasus, pemerintah bahkan membentuk LSM sendiri. Pemerintah juga dapat membentuk payung untuk LSM, atau dapat mengkooptasi payung organisasi yang dibentuk LSM sendiri. Tetapi harus dicatat bahwa sifat dan derajat kooptasi dapat bervariasi tergantung pada tindakan pemerintah dalam mengatur.

5. Pembubaran (*Containment/Sabotage/Dissolution*)

Pemerintah melihat LSM sebagai tantangan bahkan ancaman sehingga pemerintah mengambil langkah tertentu untuk membatasi ruang gerak LSM atau bahkan membubarkan LSM yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Sesungguhnya model hubungan antara LSM dan pemerintah yang bersifat *containment/sabotage/dissolution*, tidak perlu terjadi seandainya terdapat kesepahaman terhadap peran masing-masing. Dari sisi pemerintah menganggap kalangan LSM merupakan kelompok pembuat onar, anti keamanan yang hanya mencari keuntungan belaka. Sementara dalam pandangan LSM, pemerintah merupakan pihak yang harus diawasi dan ditekan karena banyak melakukan manipulasi yang merugikan masyarakat. LSM sebagai kelompok yang menyuarkan kepentingan masyarakat merasa perlu membela rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. Model hubungan semacam ini oleh Meuthia Ganie-Rochman disebut sebagai hubungan yang sifatnya *conflictual*. Hubungan antara LSM dan pemerintah adalah hubungan yang bersifat politis, LSM mengambil peran sebagai kelompok yang kritis dan mempertentangkan kepentingan rakyat



dengan ketiakadilan dari pemerintah. Karakter dari LSM-LSM kritis ini adalah menggunakan kritik legitimasi sebagai alat untuk menekan pemerintah. LSM-LSM yang terkait dalam model hubungan konfliktual ini, umumnya adalah LSM dengan ruang lingkup kegiatan dibidang pengawasan, yang oleh Afan Gaffar menyebutnya sebagai LSM politik.

Sementara itu, khusus di Indonesia, Philip Eldridge (dalam Corrothers and Suryatna, 1995) mengajukan tiga model hubungan antara LSM-Pemerintah, dilihat dari dimensi orientasi LSM dalam kegiatannya.

Model yang pertama disebut sebagai *High Level Partnership: Grassroots Development*. LSM yang masuk dalam kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ketimbang yang bersifat politis. Namun mereka mempunyai perhatian yang sangat besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. LSM seperti ini, pada umumnya, tidak begitu besar dan banyak yang bersifat local. Namun demikian, tidak jarang mereka terlibat dalam kegiatan yang besar dan selalu memelihara dukungan pada tingkat *Grassroots*.

Model yang kedua disebut *High Level Politics: Grassroots Mobilizations*. LSM yang termasuk dalam kategori ini mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan mereka tidak jarang berhubungan dengan usaha untuk mendukung “peningkatan kesadaran politik” masyarakat.

Mereka pada umumnya tidak begitu saja dapat bekerja sama dengan pemerintah, sekalipun ada juga diantaranya telah mendapat proyek-proyek penelitian dari

pemerintah. LSM dalam kategori ini bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi masyarakat guna mendapat tempat dalam kehidupan politik.

Model yang ketiga disebut sebagai *Empowerment at the Grassroots*.

LSM ini cenderung memusatkan perhatiannya pada usaha untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada tingkat *Grassroots*. Mereka tidak begitu berminat untuk mengadakan kontak dengan pejabat pemerintah. Mereka tidak juga memusatkan perhatian dan energinya untuk kampanye guna mengadakan perubahan. Mereka juga percaya, bahwa perubahan akan muncul sebagai akibat dari meningkatnya kapasitas masyarakat, bukan sesuatu yang berasal dari pemerintah. Dan mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan yang berskala besar.

Untuk memperoleh, gambaran lebih jelas mengenai hubungan antara pemerintahan dengan LSM, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4
Model-Model LSM

ORIENTASI	1	2	3
Kerja sama dengan Pemerintah?	Ya	Terbatas	Tidak
Pembangunan atau mobilisasi	Pembangunan	Mobilisasi	
Penetrasi Negara	Medium	Tinggi	Rendah
Hubungan antara kelompok kecil dan LSM	Semi-independent	Saling Mendukung	Otonom
Orientasi dengan bergantung Negara	Akomodatif	Untuk Perubahan	keadaan

Sumber: Philip Eldridge, *NGO's in Indonesia: Popular Movement or Arm of Government*, sebagaimana dikutip oleh Andra L. Corrothers and Estie W. Suryatna, *Review of the NGO sector in Indonesia and evolution of the Asia Pasific Regional Community Concept Among Indonesia NGOs*, dalam Tadashi Yamamoto, *Emerging Civil Society in The Asia Pacific Community* dalam Gaffar (1999:214)



Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara LSM-Pemerintah bersifat kompleks. Dalam negara yang demokrasi, LSM tidak dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kekuasaan. Bahkan, LSM dapat menjadi mitra bagi pemerintah, karena dapat mengisi ruang publik dalam rangka pembentukan agenda publik. Tetapi, dalam sebuah negara disitu proses politiknya tidak memperlihatkan warna demokrasi sebagaimana umumnya dikenal oleh kalangan pengkaji demokrasi, maka hubungan antara LSM-Pemerintah tidaklah dapat dikatakan baik, karena sering kali menganggap LSM sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Apalagi kalau kalangan LSM sendiri sudah ambil sikap sebagai lembaga yang memonitor dan tidak berakomodasi dengan negara. Namun demikian, persoalannya juga terletak pada bagaimana masing-masing pihak mengartikulasikan kepentingan mereka.

D. Konsep Kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. (Sulistiyani, 2004:127)

Konsep kemitraan memiliki cakupan yang sangat luas meliputi perilaku, sikap, nilai-nilai dan teknik. Kemitraan secara mendasar dapat didefinisikan menurut dua cara yaitu: Pertama, melalui atribut yang sangat melekat pada kemitraan seperti: kepercayaan, saling berbagai visi dan komitmen jangka panjang. Kedua, melalui proses di mana kemitraan dilihat sebagai suatu



kata kerja, seperti membangun pernyataan misi, kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan bersama serta pengorganisasian lokakarya kemitraan (Crowley & Karim, 1995), Li et al (2000) menambahkan kedua cara mendefinisikan kemitraan sebagai jalan menuju kebangkitan sebuah struktur organisasi yang baru atau.

Koraltan & Dikbas (2002) menyebutkan kemitraan sebagai sebuah *new management approach*. (<http://digilib.petra.ac.id>)

Kemitraan jika dilihat dari perspektif etimologis diadaptasikan dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004:129). Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Sulistiyani, 2004:129):

1. Ada dua pihak atau lebih
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan
4. Saling membutuhkan

Untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Kesamaan perhatian (common interest) atau kepentingan,
2. Saling mempercayai dan saling menghormati



3. Tujuan yang jelas dan terukur
4. Kesediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

Adapun prinsip-prinsip kemitraan adalah (1) Persamaan atau equality, (2) Keterbukaan atau transparansi dan (3) Saling menguntungkan atau mutual benefit. Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat maka diperlukan komitmen yang seimbang untuk mengatasi yang menjadi tujuan bersama. Pihak-pihak yang bermitra dapat memiliki kesamaan misi untuk saling mengisi. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.

Keunggulan kemitraan, sebagaimana pada kooperasi (kerjasama) terletak pada kepercayaan. Kepercayaan sebagai sisi utuh yang ada dalam kehidupan manusia merupakan sisi strategis dalam membangun keberhasilan individu/orang, masyarakat maupun organisasi. Jepang sebagai negara maju dan modern, keberhasilan pembangunannya karena mampu meletakkan kepercayaan pada posisi yang paling utama dalam manajemen pembangunannya. Sehingga kepercayaan seperti sebuah ideologi yang selalu terpatri dalam setiap perilaku masyarakat Jepang. Keberhasilan peradaban (*civilization*) di Eropa karena mampu meletakkan kepercayaan pada setiap landasan pembangunan manusia (*human development*), sehingga Eropa menjadi bangsa yang pertama mampu membangun peradaban modern. Islam sebagai *rahmatan lil alamin* yang disebarkan Nabi Muhammad, s.a.w. pertama kali berhasil menyebarkan ideologinya karena dengan



berbekal kepercayaan. Bangsa Arab memeluk Islam karena percaya bahwa Muhammad adalah utusan.

Seperti dijelaskan pada sub bab yang kedua, Kemitraan Pemerintah dengan LSM didasarkan pada model kedua dan ketiga dari hubungan Pemerintah dengan LSM (fasilitasi dan Kolaborasi/ kerja sama). Kemitraan ini bisa berbentuk formal atau informal, terkait secara struktural ataupun operasional.

Kemitraan yang sinergis sangat mungkin terwujud jika Pemerintah dengan LSM berusaha lebih memperhatikan kontribusi yang saling melengkapi, ketimbang kontribusi yang saling bersaing. Evans (1996) mengatakan bahwa pendekatan “sinergi negara-masyarakat” (*state-society synergy*) dapat dikembangkan untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan. Sinergi biasanya menyatukan antara *complementarity* dan *embeddedness*. *Complementarity* adalah hubungan yang saling mendukung, sedangkan *embeddedness* adalah ikatan yang menghubungkan warga negara dengan pejabat publik. Sinergi dapat dikembangkan dimana pemerintah yang aktif dan komunitas yang giat saling melakukan kerja sama. Bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, masih bisa dibentuk hubungan yang saling menguatkan dalam bentuk “sinergi negara-masyarakat” yang melibatkan pemerintah dengan LSM (Suharko, 2005:74).

E. Hubungan Tiga Dimensi Kemitraan

Dalam perjalanan sejarah pembangunan dalam beberapa dekade, pembangunan dilakukan oleh pemerintah secara *single fighter*, dan rakyat berposisi sebagai objek penerima yang harus mau diintervensi, tanpa diberi ruang



untuk berpendapat dan mengelola sendiri. Belajar dari pengalaman pahit akan kegagalan program-program pembangunan maka muncullah ide kemitraan. Membangun kemitraan hendaknya mempertimbangkan aspek kemampuan pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kemitraan tersebut. Karena membangun kemitraan yang serampangan justru dapat memunculkan ketimpangan dan ketergantungan. Oleh karena itu hendaknya berjalan seiring dengan kemitraan ini.

Di dalam membangun legitimasi kekuasaan masyarakat ada tahapan proses sebagai berikut: (1) dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat, (2) dari pemerintah bersama rakyat untuk rakyat, dan (3) dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Didalam Teori Organisasi dan Manajemen dalam sektor Publik, Harmon dan Mayer Dalam Suacana (2011) mengindikasikan adanya tiga arena Organisasi dan Manajemen sektor Publik, yaitu:

1. *Inter-organizational* arena. Suatu arena dimana administrator publik bertindak sebagai wakil dan agen dari organisasi (negara) dalam berhubungan dengan organisasi-organisasi lain bisa berbentuk LSM atau komunitas-komunitas lain. Di arena ini terjadi hubungan antar organisasi, masing-masing aktor dalam melakukan hubungan mengemban misi dari organisasi yang diwakilinya.
2. *Intra-organizational relations*. Dalam arena ini yang menonjol adalah struktur internal yang mendefinisikan hubungan dalam organisasi. Hubungan ini dapat digambarkan dalam bagan yang menunjukkan siapa menjabat apa, siapa melapor kepada siapa dalam satu unit organisasi. Disini manusia dalam organisasi bertindak mewakili peranan individual

yang dimainkan (sebagai kepala, sekretaris, atau bendahara) bukan sebagai pribadi yang utuh. Hal yang ditonjolkan di sini adalah bagaimana suatu peran berhubungan dengan peran lain. Dalam kerangka hubungan ini kita dapat membedakan antara organisasi formal dan organisasi informal. Pada organisasi formal, hubungan yang terjadi adalah dalam kaitannya dengan peran formal yang secara sah diemban oleh setiap aktor, sedangkan pada organisasi informal hubungan antar individu terjadi di luar peranan formal tersebut, tetapi berdasarkan kesepakatan tidak resmi atau tradisi. Hubungan ini lebih bersifat hubungan yang mencakup dalam organisasi itu sendiri.

3. *Organization to individual relations*. Dalam arena ini hubungan yang terjadi adalah antara individu yang bertindak di bawah otoritas (organisasi) yang dimilikinya dengan orang-orang lain sebagai pribadi, baik yang ada di dalam atau di luar organisasi. Hubungan ini bisa didasarkan misalnya administrator publik sebagai wakil dari organisasi (negara) menjalin kerja sama aktor individu (masyarakat).

Dalam hubungan tiga dimensi ini setiap sektor memiliki peran sendiri-sendiri. Pemerintah lebih banyak berperan pada penentu rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada peran pengambil keputusan dan pendanaan. Sedangkan swasta lebih banyak pada implementasi penentuan langkah/*policy action* bersama masyarakat.

Secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, *monitoring* maupun evaluasi. Peran masyarakat



yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi di bidang pendanaan, merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Peran yang lain lagi adalah masyarakat sebagai pemelihara kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

F. Konsep Anak Jalanan dan Karakteristiknya

Konsep “anak” didefinisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Untuk kebutuhan penelitian ini, anak didefinisikan sebagai seorang manusia yang masih kecil yang berkisar usianya antara 6–16 tahun yang mempunyai ciri-ciri fisik yang masih berkembang dan masih memerlukan dukungan dari lingkungannya. Seperti manusia pada umumnya, anak juga mempunyai berbagai kebutuhan: jasmani, rohani dan sosial. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu mencakup : kebutuhan fisik (udara, air, makan), kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi, kebutuhan untuk penghargaan, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan bertumbuh.

Sebagai manusia yang tengah tumbuh-kembang, anak memiliki keterbatasan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan tersebut yang merupakan hak anak. Orang dewasa termasuk orang tuanya, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Permasalahannya adalah orang



yang berada di sekitarnya termasuk keluarganya seringkali tidak mampu memberikan hak-hak tersebut. Seperti misalnya pada keluarga miskin, keluarga yang pendidikan orang tua rendah, perlakuan salah pada anak, persepsi orang tua akan keberadaan anak, dan sebagainya. Pada anak jalanan, kebutuhan dan hak-hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik. Untuk itulah menjadi kewajiban orang tua, masyarakat dan manusia dewasa lainnya untuk mengupayakan upaya perlindungannya agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara optimal.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam merumuskan hak-hak anak. Respon ini telah menjadi komitmen dunia internasional dalam melihat hak-hak anak. Ini terbukti dari lahirnya konvensi internasional hak-hak anak. Indonesia pun sebagai bagian dunia telah meratifikasi konvensi tersebut. Keseriusan Indonesia melihat persoalan hak anak juga telah dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tanpa terkecuali, siapapun yang termasuk dalam kategori anak Indonesia berhak.

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain, atau beraktifitas lain.

Anak jalanan tinggal dijalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarganya yang tidak mampu menanggung beban karena faktor ekonomi yaitu kemiskinan. Konsep Anak Jalanan. Banyak anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis, pengamen, pemulung, pengasong, pencopet, dan lain-lain. Dalam buku “intervensi Psikososial” (Depsos, 2001:20), anak jalanan adalah anak yang



sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya.

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2000:2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:

1. Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria :
 - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya
 - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk “bekerja”
 - c. Tidak lagi sekolah
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun
2. Anak jalanan yang bekerja dijalanan, dengan kriteria :
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - b. 8-16 jam berada di jalanan
 - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/saudaranya, umumnya di daerah kumuh
 - d. Tidak lagi sekolah
 - e. Pekerjaan: penjual Koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dan lain-lain
 - f. Rata-rata berusia dibawah 16 tahun
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria :
 - a. Bertemu teratur setiap hari / tinggal dan tidur dengan keluarganya
 - b. 4-5 jam kerja di jalanan
 - c. Masih bersekolah
 - d. Pekerjaan : penjual Koran, penyemir, pengamen, dan lain-lain
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun
4. Anak jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria :
 - a. Tidak lagi berhubungan / berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - b. 8-24 jam berada di jalanan
 - c. Tidur di jalan atau rumah orang tua
 - d. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi
 - e. Pekerjaan : calo, mencuci bis, menyemir, dan lain-lain

G. Pelatihan Anak Jalanan

1. Pengertian Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu istilah yang memiliki konotasi yang berbeda, yaitu tergantung pada pengalaman dan latar belakang seseorang. Karena pelatihan pada umumnya merupakan salah satu jalan atau alternatif untuk memecahkan



persoalan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia kerja misalnya, pelatihan dihubungkan sebagai pemberi petunjuk, orientasi dan pengarahan agar dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik.

Pelatihan juga merupakan penciptaan lingkungan di mana seseorang dapat menemukan hal-hal baru seperti belajar tentang sikap, kemampuan, keahlian dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan suatu pekerjaan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Henry Simamora (1995:287), tentang pelatihan yang dirumuskan dengan serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seorang individu atau kelompok.

Dari beberapa pengertian tersebut mengenai pelatihan dapat diambil kesimpulan ke dalam beberapa hal : Pertama, dalam suatu pelatihan terdapat proses yang digunakan sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Berarti pelatihan di sini berusaha mengatasi kesenjangan yang ada pada diri seseorang, yaitu antara keadaan masa kini dengan keadaan yang diharapkan. Kedua, dalam pelatihan juga terdapat proses transfer kemampuan seseorang kepada orang lain untuk memasuki suatu pekerjaan dari suatu situasi ke situasi lain dengan cara mendemonstrasikan atau memodelkan apa yang mereka lakukan serta membantu orang lain dalam mempelajari prosedur pelatihan yang belum mereka ketahui. Ketiga, bahwa pelatihan pada hakekatnya bertujuan memberikan bantuan kepada peserta agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi segala persoalan dalam kehidupannya. Keempat, bila dihubungkan dengan pendidikan orang dewasa (andragogi), pelatihan ini



biasanya bertujuan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan belajarnya.

2. Tujuan Pelatihan

Secara umum pelatihan bertujuan untuk: 1) menambah keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif, 2) mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan 3) mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama (Moekijat, 1993:2-3). Biasanya tingkat pengetahuan dari hasil pelatihan yang pernah diikutinya dapat mencerminkan kemampuan intelektual seseorang.

Walaupun secara tradisional jenis dan tingkat pendidikanlah yang digunakan seseorang untuk mencari pekerjaan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan pelamar.

Henry Simamora (1995:288), merumuskan ada 5 (lima) tujuan dari pelatihan, yaitu : 1) memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan perkembangan teknologi, 2) mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru untuk menjadi kompeten dalam suatu pekerjaan, 3) membantu memecahkan permasalahan operasional, 4) mempersiapkan pegawai untuk suatu promosi tertentu, dan 5) mengorientasikan pegawai terhadap organisasi. Sedangkan menurut M. Saleh Marzuki (1992:18), merumuskan pelatihan ke dalam 3 (tiga) tujuan pokok, yaitu : 1) untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi, 2) melalui pelatihan peserta akan memperoleh pengertian dan pemahaman yang lengkap tentang pekerjaannya dengan standar dan kecepatan yang telah ditetapkan dalam



keadaan aman dan normal, dan 3) membantu para pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugasnya.

Berangkat dari beberapa uraian tersebut di atas, jelas konsep dasarnya ditarik dari filsafat progresivisme, karena filsafat inilah yang menetapkan nilai-nilai kemanusiaan demikian tinggi (Darkenwald & Marian dalam Dadang Sofyan, 1995:23). Dengan demikian uraian tersebut menunjukkan peranan pelatihan tidak hanya menyangkut untuk pemenuhan kebutuhan individu tetapi lebih luasnya lagi pada pemenuhan kebutuhan organisasi.

3. Manfaat Pelatihan

Banyak pelatihan dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat.

Beberapa manfaat seperti yang diungkapkan oleh Robinson (1981:19) dalam M. Saleh Marzuki (1999:28) sebagai berikut :

- a. Pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki penampilan/kemampuan individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki performance organisasi. Perbaikan-perbaikan itu dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Pelatihan yang efektif dapat menghasilkan pengetahuan dalam pekerjaan/tugas, pengetahuan tentang struktur dan tujuan perusahaan / organisasi, tujuan bagian-bagian tugas masing-masing karyawan dan sasarannya, tentang sistem dan prosedur, dan lain-lain.
- b. Keterampilan tertentu diajarkan agar para karyawan dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai standar yang diinginkan. Contoh: skill dalam menggunakan teknik yang berhubungan dengan fungsi "behavioral skill" dalam mengelola hubungan dengan atasan (boss), dengan bawahan dan sejawat.
- c. Pelatihan juga dapat memperbaiki sikap-sikap terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan atau karyawan, seringkali pula sikap-sikap yang tidak produktif timbul dari salah pengertian yang disebabkan oleh informasi yang tidak cukup, dan informasi yang membingungkan. Karena itu salah satu informasi dalam kebijakan pelatihan ditujukan pada penjelasan tentang fakta-fakta secara jujur.
- d. Manfaat lain dari pada pelatihan adalah memperbaiki standar keselamatan. Di salah satu perusahaan listrik dilaporkan bahwa



pelatihan telah banyak membantu memperbaiki keselamatan dari bahaya aliran listrik. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Faustino C. G. dalam Ii Wahyudin (2003:46), yang menyebutkan bahwa pelatihan hanya bermanfaat dalam situasi di mana para pegawai kekurangan kecakapan dan pengetahuan. Dari beberapa uraian tersebut jelas bahwa pelatihan merupakan sarana yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para pegawai organisasi yang dipandang kurang efektif sebelumnya, mengurangi adanya dampak negatif yang disebabkan kurangnya pengetahuan, kurangnya kepercayaan diri atau pengalaman yang terbatas dari anggota atau kelompok tertentu.

Dalam pengembangan pembinaan sumber daya manusia jelas pelatihan mutlak diperlukan, kemitlakan itu tergambar pada berbagai jenis manfaat yang dapat diambil dari padanya, baik bagi organisasi atau kelompok masyarakat, bagi para pegawai atau peserta pelatihan maupun bagi penumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi baik dalam berbagai kelompok kerja maupun antara peserta di dalam kelompok, yang semuanya diharapkan bermuara pada peningkatan produktifitas.

Sebagaimana diungkapkan Sondang P. Siagian (1998:183-185), disebutkan penyelenggaraan program pelatihan bermanfaat bagi organisasi maupun para anggota organisasi. Bagi organisasi sedikitnya terdapat 7 (tujuh) manfaat, yaitu : Pertama: Peningkatan produktifitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadinya pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh subur kerja sama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda bahkan yang spesialisistik, meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Kedua: Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan antara lain

karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknis maupun intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Ketiga: Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh manajer. Keempat: Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Kelima: Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Keenam: Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya. Ketujuh: Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi.

Sedangkan manfaat bagi para anggota organisasi atau peserta pelatihan menunjukkan paling sedikit 10 (sepuluh), yaitu :

- a. Membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik.
- b. Meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi.
- c. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional.
- d. Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan kerjanya.
- e. Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stress, frustrasi dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya pada diri sendiri.
- f. Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknis dan intelektual.
- g. Meningkatkan kepuasan kerja.



- h. Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang.
- i. Makin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri.
- j. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru dimasa depan.

4. Perencanaan Pelatihan

Perencanaan pelatihan adalah suatu penentuan urutan tindakan, identifikasi masalah, perumusan tujuan, materi, kurikulum, fasilitator, biaya, waktu, akomodasi, dan konsumsi. Untuk suatu kegiatan pelatihan hendaknya didasarkan atas data dengan memperhatikan prioritas secara wajar dan efisien guna tercapainya tujuan (Ii Wahyudin, 2003:25).

Dalam merencanakan suatu kegiatan pelatihan ada beberapa langkah atau tahap yang harus dilalui, yaitu :

- a. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan ; Pada langkah ini perencanaan menjajagi dan mengetahui kebutuhan pelatihan serta sejauhmana kebutuhan tersebut perlu dipenuhi. Kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tahap pertama yang sangat penting dalam proses perencanaan, karena dalam identifikasi kebutuhan inilah seluruh kegiatan pelatihan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Anwar Prabu (2000:46) mengemukakan terdapat 3 (tiga) macam identifikasi kebutuhan yaitu : (1) Kebutuhan pelatihan tingkat organisasi/lembaga; identifikasi kebutuhan ini didasarkan pada adanya tujuan lembaga, di mana lembaga mencoba untuk membandingkan “capaian lembaga” dengan tujuan yang diharapkan; (2) Kebutuhan pelatihan tingkat jenjang kepangkatan/posisi; dalam kategori ini kebutuhan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan,



keterampilan, sikap yang diperlukan untuk melakukan berbagai tugas tertentu sesuai dengan posisi atau jabatan tertentu. (3) Kebutuhan pada tingkat individu/perorangan, yaitu memberikan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada setiap individu, guna peningkatan taraf kehidupannya.

b. Merumuskan Tujuan Pelatihan; Tujuan pelatihan harus mengacu kepada hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan sebelumnya.

Tujuan pelatihan berfungsi sebagai petunjuk yang memberikan arah dan biasanya dirumuskan secara umum dan khusus dengan menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang mudah dicerna dan berisikan sasaran yang hendak dicapai dalam pelatihan. Cara merumuskan tujuan, Henry Simamora (1995:305) mengemukakan sebagai berikut : (1) Dirumuskan dengan menggunakan istilah atau kata kerja operasional seperti, membuat, membangun, mengerjakan; (2) Menentukan standar kerja yang dinyatakan dalam istilah, tingkat dan akurasi; (3) Menentukan kendala-kendala yang relevan dan batasan untuk melaksanakan perilaku tersebut.

c. Menentukan Peserta Pelatihan. Di dalam menentukan peserta pelatihan hendaknya mempertimbangkan vertikal, di mana hal ini berkaitan dengan struktur dan fungsi yang melekat dalam sistem manajemen. Di samping itu dalam menentukan jumlah peserta perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelatihan. Untuk itu perlu adanya skala prioritas berdasarkan pada



analisis kebutuhan pelatihan, dengan mempertimbangkan, bagian, unit, atau kesatuan manakah yang dirasakan kinerjanya paling rendah atau tidak mencapai hasil yang diharapkan, siapakah yang mempunyai kinerja perorangan tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan, apakah hubungan vertikal dan hubungan horizontal dalam struktur organisasi mempengaruhi kinerja.

- d. Mendesain Program Pelatihan. Penyusunan desain program pelatihan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelatihan yang mencakup tujuan pelatihan, struktur program, peserta, fasilitator, waktu yang diperlukan, materi, metode, sarana dan prasarana. Mendesain kegiatan pelatihan diawali dengan proses identifikasi kebutuhan, yang di dalamnya mencakup hasil analisis dari kebutuhan yang diperlukan dalam pelatihan. Suatu pelatihan pada hakekatnya adalah pengembangan dari hasil identifikasi kebutuhan sehingga menjadikan bagian yang tak terpisahkan dari proses identifikasi kebutuhan. Ketetapan dalam desain pelatihan mendukung terhadap tercapai tidaknya tujuan pelatihan. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu pelatihan seperti : “ Rumusan tujuan yang dapat di ukur, penetapan syarat-syarat peserta pelatihan, pemilihan materi yang cocok dengan kebutuhan, penetapan waktu, rencana evaluasi dan pelaksanaan pelatihan (Ii Wahyudin, 2003:29).



e. Merancang Silabus dan Kurikulum; Menyusun kurikulum dan silabus adalah merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam suatu pelatihan. Dalam kurikulum dan silabus terdapat materi yang harus diberikan kepada peserta pelatihan. Selain itu kurikulum dan silabus juga sebagai pedoman penting untuk arah pemberian materi, terutama bagi nara sumber atau instruktur dalam memberikan materi pelatihan. Komponen dalam kurikulum dan silabus meliputi ; tujuan pelatihan, yang mencakup 3 domain, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan serta tingkat kedalaman tujuan pelatihan masing-masing domain; materi pelatihan, yaitu isi atau materi yang perlu ditransformasikan atau dibahas guna mencapai tujuan tersebut di atas; metode dan media pelatihan, yaitu cara dan alat bantu apa yang digunakan untuk memproses materi untuk mencapai tujuan yang diharapkan; Peserta pelatihan, yaitu kebutuhan peserta pelatihan serta latar belakang peserta pelatihan, baik yang berupa pengalaman, pengetahuan, maupun latar belakang lainnya yang akan menentukan tujuan, metodologi, maupun isi pelatihan; Fasilitator pelatihan, yang menyangkut kualifikasi fasilitator perlu pula dipertimbangkan untuk memproses materi pelatihan sehingga dapat mencapai tujuan. Ada dua hal yang penting perlu dipertimbangkan dalam menentukan fasilitator yaitu : keterampilan “memproses” dalam hal ini menguasai metodologi dan menguasai isi/materi pelatihan yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan; Evaluasi pelatihan; yaitu



sejauh mana tujuan dapat tercapai dan melihat efektivitas penyelenggara pelatihan. Dalam hal ini evaluasi tidak hanya untuk mengukur terjainya perubahan perilaku peserta pelatihan, tetapi juga melihat efektivitas, yang mencakup komponen-komponen di atas.

5. Pelaksanaan Pelatihan

Keberhasilan pelaksanaan pelatihan tergantung pada ketepatan dan kelengkapan desain program pelatihan, kesiapan fasilitator dan peserta, dana dan fasilitas pendukung proses pelatihan. Tugas fasilitator sangat penting dalam pelaksanaan pelatihan, hal ini terkait dengan ketepatan pemilihan metode dan teknik yang digunakan dalam pelatihan tersebut.

Setiap teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknik yang tepat, seperti tujuan, sifat, materi, peserta, fasilitator, waktu pelatihan.

Teknik pembelajaran yang sering digunakan dalam suatu pelatihan, D. Sudjana (2001:112) mengemukakan diantaranya: “Ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, diskusi, role playing, simulasi dan demonstrasi”. Di bawah ini dikemukakan secara berurutan sedikit tentang teknik-teknik pembelajaran ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan kerja kelompok.

- a. Teknik ceramah; metode ini sering disebut dengan teknik kuliah (*the lecture method*), dapat pula dikatakan sebagai deskripsi lisan secara sepihak oleh seorang fasilitator/instruktur dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran tertentu dengan jalan menyimak dan



mendengarkan. Peran fasilitator/instruktur dalam teknik ini sangat aktif dan dominan, sedangkan peserta hanya duduk dan mendengarkan saja. Teknik ini kurang tepat digunakan dalam proses pembelajaran dan pelatihan bagi orang dewasa. Selanjutnya Moedjiono dan M. Dimyati (1992:29) mengemukakan bahwa : “Metode ceramah atau kuliah mimbar, adalah suatu bentuk pengajaran di mana dosen mengalihkan informasi kepada sekelompok besar peserta didik dengan cara yang utama bersifat verbal (lisan)”. Sedangkan Gilstrap dan Martin (1975:8) mendefinisikan : “Metode ceramah sebagai suatu metode mengajar di mana guru memberi penyajian fakta-fakta dan prinsip-prinsip secara lisan”.

b. Teknik tanya jawab; adalah suatu format interaksi belajar mengajar atau interaksi antara guru-siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respons lisan dari siswa sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru kepada siswa (Moedjiono, dkk, 1992:41). Pengetian atau batasan tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam teknik tanya jawab guru dan siswa keduanya sama-sama aktif. Namun demikian, keaktifan peserta didik tergantung sepenuhnya kepada keaktifan guru yang dalam hal ini adalah instruktur pelatihan. Dengan demikian keberhasilan teknik tanya jawab tergantung pula kepada penguasaan terhadap teknik-teknik bertanya dan jenis-jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru.



Para guru/instruktur mempunyai sejumlah alasan yang menjadi landasan penggunaan teknik tanya jawab dalam proses pembelajaran. Alasan tersebut meliputi: (1)

Membangkitkan/menimbulkan keingintahuan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang sedang dibicarakan, sehingga mendorong minat peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

(2) Membangkitkan, mendorong, menuntun dan membimbing pemikiran yang sistematis, kreatif dan kritis pada diri siswa. (3)

Meningkatkan keterlibatan peserta didik, dengan menjawab pertanyaan dalam proses pembelajaran sehingga dapat terwujud cara belajar siswa aktif. (4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengekspresikan diri, sehingga dapat memupuk dan mengembangkan kemampuan untuk mengatakan pendapat dengan tepat. (5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik

menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk belajar sesuatu yang baru (Moedjiono dan Moh. Dimiyati, 1992:41). Dari sejumlah alasan yang menjadi landasan penggunaan teknik Tanya jawab, dapat

disimpulkan bahwa teknik tanya jawab tidak dimaksudkan untuk mengadakan penilaian terhadap peserta didik.

c. Teknik Demonstrasi: metode atau teknik pembelajaran yang digunakan oleh pendidik terhadap peserta didik dengan cara memperlihatkan, menceritakan dan memperagakan bahan belajar itu (D. Sudjana, 2001:154). Teknik demonstrasi dapat dibagi dalam dua



macam, yaitu; demonstrasi proses dan demonstrasi hasil. Teknik demonstrasi proses digunakan untuk menunjukkan atau memperagakan suatu proses atau rangkaian langkah-langkah kegiatan. Dalam proses pelatihan otomotif para instruktur memperlihatkan atau memperagakan langkah-langkah dalam memperbaiki sebuah mesin motor atau mobil yang rusak, sejak dari mendeteksi kerusakan dan akhirnya memasangkan kembali komponen mesin kepada posisi semula.

- d. Teknik kerja kelompok : digunakan oleh pendidik untuk membantu peserta didik supaya mereka mampu melakukan kerja sama di dalam kelompok-kelompok yang sengaja dibentuk, guna melaksanakan kegiatan pembelajaran tertentu yang ditugaskan kepada para peserta didik. Dengan demikian kerja kelompok adalah “Kerja sama yang dilakukan oleh kumpulan peserta didik yang jumlahnya terbatas” (D. Sudjana, 2001:160). Penggunaan teknik ini ditandai oleh beberapa aspek berikut ini : (1) Tersusunnya pembagian tugas kegiatan belajar untuk mencapai tujuan; (2) Adanya aturan-aturan atau prosedur pelaksanaan tugas; (3) Peserta didik diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melaksanakan tugas; (4) Tersedianya fasilitas, alat, waktu dan daya dukung lainnya, dan (5) Adanya kerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab diantara peserta didik dalam kelompok.



H. Kedudukan LSM Dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan

Menurut pasal 31 ayat (1) UUD 1945 (amandemen ketiga) menyebutkan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Berbagai bentuk penanganan terhadap anak jalanan seperti pembinaan diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak jalanan. Pembinaan itu harus didasarkan kepada perlindungan hak-hak anak agar anak jalanan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Pembinaan terhadap anak jalanan diharapkan mampu melepaskan anak jalanan dari kehidupan jalanan serta menanamkan kepada anak jalanan untuk berperilaku normatif.

Selain pemerintah, ada beberapa pihak yang dibebani oleh hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak membebankan kepada beberapa pihak untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik kewajiban dan tanggung jawab. Memberikan perlindungan disebutkan dalam pasal 20 Undang-undang perlindungan anak yaitu “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Perlindungan ini wajib diberikan kepada semua anak Indonesia tanpa terkecuali termasuk didalamnya adalah anak-anak jalanan. Penyelenggaraan pembinaan anak jalanan adalah kewajiban semua orang. Masyarakat dibebani kewajiban oleh hukum dalam rangka penyelenggaraan pembinaan itu khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan anak.



Peran masyarakat ini diatur khusus dalam pasal 72 Undang-undang perlindungan anak:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang-orangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Jadi masyarakat bisa berperan aktif melalui lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan, LSM mempunyai kedudukan dalam fungsinya menyelenggarakan perlindungan baik terhadap manusia pada umumnya dan anak pada khususnya. Secara yuridis, LSM mempunyai peran dalam pembinaan anak jalanan yaitu dalam rangka memberikan pembinaan bagi anak jalanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2003:3). Menurut Lisa Harisson, pendekatan kualitatif berusaha menganalisis mengenai perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan (Moh Nazir, 1993:63).

Salah satu karakteristik pendekatan kualitatif bahwa penelitian kualitatif sangat menekankan data asli atau *natural condition*. Dalam pendekatan kualitatif peneliti berinteraksi dengan informan dalam konteks yang alami (Arikunto, 2002:14).

Pertimbangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila menghadapi kenyataan ganda.

Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan pengaruh dan pola-pola nilai-nilai yang dihadapi. Dan juga karena hakekat penelitian kualitatif ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha mematuhi bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.



Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variable. Dalam penelitian ini, akan dijabarkan kondisi-konkrit dari objek penelitian, menghubungkan satu variable atau kondisi dengan variable lainnya dan selanjutnya dideskripsi tentang objek penelitian. Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat, fakta-fakta, dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi (Rianto Adi, 2004:4). Penelitian deskriptif mempunyai karakteristik-karakteristik seperti yang dikemukakan Furchan (2004) bahwa (1) penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat. (2) tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan (3) tidak adanya uji hipotesis.

B. Fokus Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan apa yang dinamakan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak melebar atau meluas kemana-mana.

Menurut Spradley yang dikutip oleh Faisal dalam Sugiyono (2008 : 34) mengemukakan empat alternative dalam menetapkan fokus :



1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Fokus dalam penelitian ini berupa hubungan, pengembangan, langkah-langkah pemerintah dan LSM dalam menangani anak jalanan. Dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa pemaparan batasan fokus yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Relasi Pemerintah Dengan LSM:
 - a. Peran Pemerintah dalam pembinaan anak jalanan
 - b. Peran LSM dalam pembinaan anak jalanan
 - c. Pola Relasi Pemerintah dengan LSM Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan
2. Program Pelatihan anak jalanan :
 - a. Proses Perencanaan Program Pelatihan Anak Jalanan
 - b. Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan
 - c. Hasil Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih sebagai objek penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan di kota Malang. Pada

Penelitian yang menjadi situs penelitian yaitu di Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial kota Malang dengan alasan mampu mewakili dalam memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah pembinaan anak jalanan dikarenakan sebagai wakil



dari pemerintah. Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang berada di JL.

Mayjen Sungkono (Perkantoran Terpadu Gedung B Lt. 3). Adapun situs

penelitian yang lain adalah :

1. Griya Baca Malang (Jalan. Kyai Tamin 1C, Malang)
2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang (Jl. LA Adi Sucipto Gg
Makam No. 30, Malang)

D. Sumber Data

Suatu penelitian harus memaparkan sumber data. Sumber data adalah tempat peneliti bertumpu artinya peneliti bertolak dari sumber data. Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber secara langsung, tanpa melalui media perantara. Data primer peneliti yaitu :

- a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan informasi, dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian adalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Responden dari pemerintah:

- 1) Dra. Pipih Triastuti selaku Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang
- 2) Drs. Hendro Sutoyo selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang



3) Dra. Kustina, M.Pd selaku Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Malang

4) Dodik Teguh P, M.Pd selaku Koordinator Rumpun Infokom UPT Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Malang

5) Umar Roffi, A.Md selaku Koordinator Rumpun TGS teknik mesin, listrik dan bangunan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Malang

Dari Lembaga Swadaya Masyarakat:

1) Hamdani selaku Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat “Griya Baca”

2) Hendro Romadhon dan Hariono selaku Anak Jalanan yang bernaung dalam lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat “Griya Baca”

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Data sekunder peneliti yaitu :

a. Dokumen

Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film (Moleong, 2000:

16). Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Dokumen yang digunakan



dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, jurnal, buletin, majalah, laporan penelitian (skripsi), dokumen pribadi dan dokumen resmi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998:24) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit (Patton dalam poerwandari, 1998). Ada 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara :



- a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.
- b. Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- c. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Menurut Yin (2002) disamping kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu:

- a. Retan terhadap bias yang ditimbulkan oleh kontruksi pertanyaan yang penyusunanya kurang baik.
- b. Retan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai.
- c. Probling yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat.
- d. Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin didengar oleh interview.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi.

Menurut Nawawi & Martini (2006:32) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Menurut Patton dalam Poerwandari (1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung,



orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Menurut Patton dalam Poerwandari (1998:43) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena :

- a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
- b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

3. Studi kepustakaan

Dengan cara membaca, mencatat literatur yang berkaitan dengan relasi pemerintah dan anak jalanan dalam pembinaan anak jalanan.

F. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data yang ada. Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong 2000: 103).



Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Menurut Milles (1992: 14) tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti menulis semua data secara obyektif dan apa adanya dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, chart atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

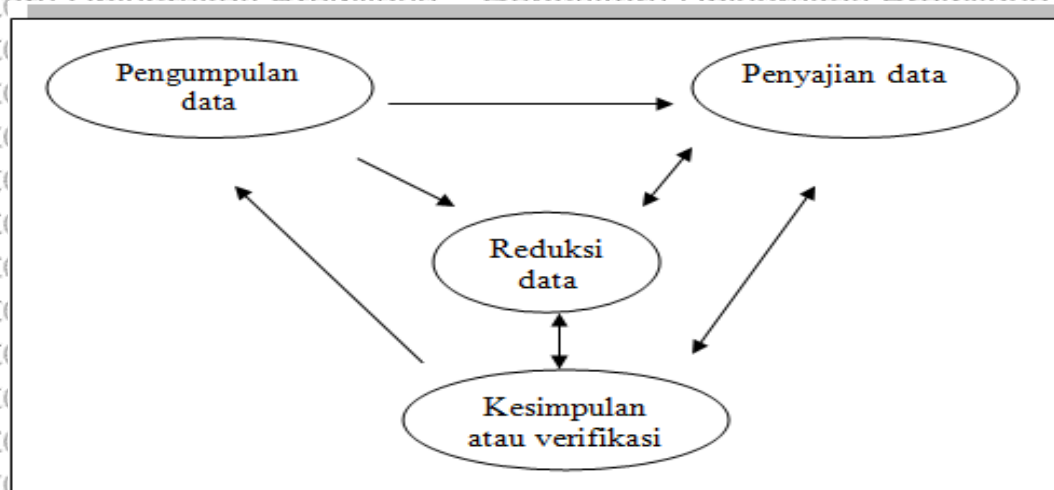
Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-

hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Tahapan analisis data kualitatif diatas dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 2

Proses Analisis Data Miles dan Hubberman



Sumber: Miles dan Hubberman (1992:20)

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian disajikan data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data.

Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Kota Malang sebagai daerah otonomi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan inisiatif pembiayaan serta dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, di samping dana dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Sosial yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan ketenagakerjaan serta pengendaliannya sesuai dengan kebijaksanaan Walikota. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kota Malang dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang telah menentukan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sebagai salah satu perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi ketenagakerjaan dan Sosial dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

Gambar 3

Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang



Sumber: *official website* Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

(a) Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

Visi

“Terciptanya Perluasan Lapangan Kerja, Perlindungan, Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Sosial”

Misi

- Meningkatkan Pelatihan dan Ketrampilan tenaga kerja yang handal dalam menghadapi pasar kerja
- Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja
- Mewujudkan Hubungan Industrial dan Ketenangan dalam bekerja
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan bidang ketenagakerjaan dan sosial
- Mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif



f. Menetapkan sistem informasi bidang ketenagakerjaan dan sosial

g. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang ketenagakerjaan dan sosial

(b) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, terdiri dari :

(a) Subbagian Penyusunan Program

(b) Subbagian Keuangan

(c) Subbagian Umum.

3) Bidang Sosial, terdiri dari:

(a) Seksi Pengembangan Potensi, Profesi dan Swadaya Sosial

(b) Seksi Rehabilitasi Sosial

(c) Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial

4) Bidang Pelatihan dan Penempatan, terdiri dari :

(a) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

(b) Seksi Penempatan Kerja.

5) Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :

(a) Seksi Penyelesaian Perselisihan

(b) Seksi Kelembagaan, Kesejahteraan Pekerja dan Purna Kerja.

(c) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan.



6) Bidang Pengawasan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja,
terdiri dari :

- (a) Seksi Norma Kerja
- (b) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- (c) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

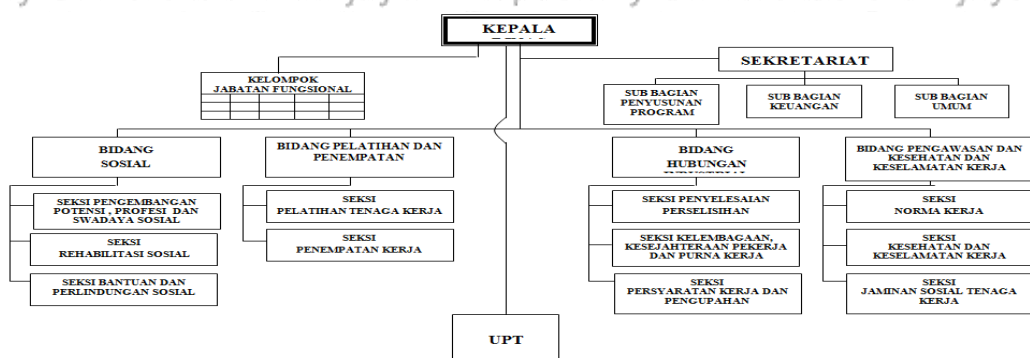
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(c) Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

Gambar 4

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang



Sumber: *official website* Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang



(d) Tugas Pokok dan Fungsi Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yaitu mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian



- g. Pengelolaan anggaran dan retribusi
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- l. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- m. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- n. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- o. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan sosial
- p. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah
- q. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi



r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

a. *SubBagian Penyusunan Program*

Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 3) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- 4) Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- 6) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- 7) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 8) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah
- 9) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya



b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 2) Pelaksanaan pentatausahaan keuangan
- 3) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan
- 4) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
- 6) Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai
- 7) Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah
- 8) Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum

Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum mempunyai fungsi:



- 1) Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- 2) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan
- 4) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- 5) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan sosial
- 6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Sosial

Bidang Sosial melaksanakan tugas pokok pengembangan potensi, profesi, dan swadaya sosial, bantuan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta bimbingan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Bidang Sosial mempunyai fungsi:

- (a) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan di bidang pengembangan potensi, profesi dan swadaya sosial, bantuan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial serta bimbingan sosial
- (b) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial, pengembangan potensi, profesi, dan swadaya sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan sosial, serta bimbingan sosial
- (c) Pemrosesan perijinan di bidang sosial



(d) Pelayanan umum di bidang sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan sosial

(e) Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan sosial

(f) Pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan

(g) Penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

(h) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial

(i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

(j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pengembangan Potensi, Profesi dan Swadaya Sosial

Seksi Pengembangan Potensi, Profesi, dan Swadaya Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan kegiatan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pengembangan potensi, profesi dan swadaya sosial, pembinaan dan pelayanan terhadap organisasi sosial, serta pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Potensi, Profesi, dan Swadaya Sosial mempunyai fungsi:



- 1) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pengembangan potensi, profesi dan swadaya sosial
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bimbingan sosial
- 3) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberdayaan peran kesejahteraan sosial keluarga serta pembinaan dan pelayanan lanjut usia dan anak terlantar
- 4) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan sistem informasi potensi, profesi, dan swadaya sosial
- 5) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyuluhan di bidang sosial
- 6) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan Karang Taruna, organisasi sosial / lembaga swadaya masyarakat / organisasi profesi, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- 7) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
- 8) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan dunia usaha
- 9) Penyiapan bahan pemberian ijin pengumpulan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat



10) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan penertiban terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah (UGB – Undian Gratis Berhadiah) oleh organisasi sosial, yayasan, atau kelompok masyarakat

11) Pelaksanaan pengendalian pengumpulan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat

12) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

1) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar

2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti, dan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui Loka Binakarya



- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar
- 4) Penyiapan bahan bimbingan, pengembangan, dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulasi usaha ekonomi produktif
- 5) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penanggulangan korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan pengidap HIV/AIDS
- 6) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan, *trafficking*, dan pekerja migran (anak, wanita, dan usia lanjut)
- 7) Pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
- 8) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

c. *Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial*

Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok pemberian bantuan dan perlindungan sosial termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, yayasan sosial, dan panti asuhan, serta bantuan kepada korban bencana dan musibah lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:



- 1) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pemberian bantuan dan pelayanan perlindungan sosial
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan yayasan sosial dan panti asuhan
- 4) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan korban bencana alam dan bencana sosial
- 5) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yayasan sosial dan panti asuhan
- 6) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan sosial keluarga tidak mampu (miskin)
- 7) Penyiapan bahan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan
- 8) Penyiapan bahan kebijakan rehabilitasi, penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
- 9) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

2. Gambaran Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan “Griya Baca”

(a) Sejarah Lembaga

Munculnya fenomena anak jalanan yang merupakan produk dari industrialisasi maka perlu penanganan serius. Anak-anak jalanan perlu memperoleh perhatian dari semua jajaran masyarakat. Barangkali yang lebih perlu diperhatikan adalah anak-anak jalanan yang muncul dengan terpaksa, karena mereka ini pada hakikatnya kehilangan hak secara fisik, psikologis, ekonomi, dan lain-lain sehingga perlu perubahan nasib.

Dalam konteks Kota Malang fenomena anak jalanan tidak bisa dielakkan lagi. Anak-anak jalanan ini sering beroperasi di pusat-pusat keramaian seperti di seputar alun-alun, pasar besar, perempatan-perempatan lampu merah, dan lain-lain.

Anak-anak jalanan yang sering beroperasi di kawasan Jagalan, alun-alun dan sekitarnya sangat perlu mendapatkan pembinaan secara intensif. Berdasarkan realitas yang ada, mayoritas dari mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengamen dan mengemis.

Adapun unsur eksploitasi yang tinggi dari orang tua memaksa mereka untuk mencari nafkah. Berangkat dari rasa empati dan kepedulian yang tinggi, layaknya anak-anak seusia mereka, sepatutnya anak-anak jalanan itu mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang layak. Griya Baca, hadir di tengah-tengah mereka untuk berbagi. Griya Baca adalah suatu Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Malang dengan akte notaris Faisal A. Weber., SH No : 11 tanggal 9



Februari 2007. Griya Baca didirikan pada tanggal 08 Oktober 2006 oleh aktivis mahasiswa yang peduli sosial di Kota Malang, berdedikasi kepada pembinaan moral anak jalanan dalam upaya mempercepat terwujudnya lingkungan bebas anak jalanan serta mencetak generasi bangsa yang memiliki moralitas tinggi.

Sampai saat ini jangkauan Griya Baca hanya berpusat pada alun-alun Kota Malang tetapi memiliki adik-adik binaan dari berbagai daerah seperti Jagalan, Muharto, dan Sukun. Lembaga ini memiliki prioritas dalam pengembangan Life Skill anak jalanan, peningkatan Mental Building wirausaha pada anak jalanan, pengembangan religiusitas anak jalanan, wacana sosial pada masyarakat tentang keshalihan sosial. Griya baca sebagai lembaga pemberdayaan anak jalanan bersifat sosial independen, berdiri pada 2005 dan diaktenotariskan pada tahun 2007.

(b) Visi dan Misi Lembaga

Visi:

Membentuk anak jalanan menjadi generasi yang mempunyai kompetensi diri, berakhlak, dan mempunyai *self awareness* yang tinggi dalam merubah keadaan menjadi kehidupan yang lebih baik.

Misi:

- 1) Memberikan bekal yang mendasar tentang akidah Islam, konsepsi syukur, dan motivasi yang bersumber pada fitrah diri sebagai seorang anak.
- 2) Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik



- 3) Meningkatkan *life skill* anak jalanan sebagai bekal kemandirian dalam bidang ekonomi, maupun aspek sosial kemasyarakatan tempat mereka berinteraksi dan bersosialisasi
- 4) Menanamkan kesadaran diri yang tinggi kepada anak jalanan dengan membudayakan berpikir positif dalam menghadapi segala situasi di lingkungannya
- 5) Menumbuhkan motivasi diri yang terus menerus dalam mencapai masa depan dan cita-citanya.
- 6) Menjadikan lembaga Griya Baca yang dibangun atas rasa kasih dan sayang

(c) Nama dan Motto Lembaga

Lembaga ini bernama “Griya Baca” dengan motto ” Berbagi Asa dan Karya”, artinya setiap anak bangsa mempunyai hak dan kesempatan yang sama secara fitrah, untuk membangun diri melalui asa atau harapan dan impiannya. Setiap anak bangsa juga mendambakan sentuhan kasih sayang dari lingkungan fisik dan *socio-culture* di sekitarnya. Karena itu griya baca berusaha memberikan pendampingan dan advokasi yang terus menerus disertai dengan karya nyata sebagai bekal ketrampilan hidup anak jalanan, sehingga mampu membawa kemandirian kepada mereka.



(d) Fungsi dan Tujuan Lembaga

Fungsi:

- 1) Menjadi lembaga swadaya masyarakat yang secara rutin memberikan pembinaan akademik dan non akademik kepada anak jalanan
- 2) Mendampingi dan mengarahkan anak jalanan untuk menemukan jati diri dan cita-citanya
- 3) Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak jalanan memiliki hak yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia sehingga keberadaannya bukan untuk dimarginalkan.
- 4) Menberdayakan anak jalanan dengan penggalian potensi yang mereka miliki dan memfasilitasinya untuk kembali ke sektor formal
- 5) Menjadi lembaga yang mengadvokasi dan memberikan perlindungan dalam bentuk pendampingan yang bersahabat
- 6) Menumbuhkan minat baca pada anak jalanan dan memotivasi mereka untuk menempuh pendidikan formal maupun informal
- 7) Sebagai sarana untuk menurunkan laju pertumbuhan anak jalanan di kota Malang.

Tujuan:

- 1) Menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral kepada anak jalanan
- 2) Menumbuhkan kebiasaan yang positif kepada anak jalanan sebagai langkah awal untuk berubah tanpa ada rasa pemaksaan



- 3) Memberikan pendidikan yang cukup kepada anak jalanan sehingga dapat terbebas dari kebodohan dan buta huruf melalui pembinaan yang berkelanjutan.
- 4) Memberikan penyadaran ke masyarakat luas untuk berparadigma positif ke anak jalanan dan dapat mau berkontribusi dalam penyelesaiannya.

3. Gambaran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang

(a) Dasar Pendirian SKB

Dalam dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih jauh ketinggalan dengan bangsa lain. Di tingkat Asia pendidikan sudah sangat majunya apalagi di tingkat Asean pendidikan sudah menjadi barang yang sangat dibutuhkan. Pendidikan dari tingkat atas (Perguruan Tinggi) sampai di tingkat dasar dan pra pendidikan dasar (PAUD) masih menyimpan masalah yang sangat krusial. Bahkan untuk warga masyarakat kita bangsa Indonesia masih terdapat kesenjangan yang cukup mencolok, ada kelompok konglomerat, golongan ekonomi menengah, kelompok ekonomi bawah, kelompok miskin dan lain – lain.

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bagian kelima pasal 26 tentang Pendidikan Non Formal menyebutkan bahwa ayat

- 1) Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat,



2) Pendidikan Non Formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional,

3) Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah menyebutkan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah untuk :

- a) Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan taraf kehidupannya,
- b) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi,
- c) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Program Pendidikan Nasional tahun 2000 – 2004 menegaskan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah (PLS) atau pendidikan non formal dan informal (PNFI) adalah untuk menyediakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang



tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain itu, program pendidikan luar sekolah juga diarahkan pada pemberian pengetahuan dasar dan keterampilan berusaha secara profesional sehingga warga belajar mampu mewujudkan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain.

Misi utama PNFI adalah pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan masyarakat kurang beruntung (*disadvantaged society*). Adanya Undang – Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah tentang PLS, semakin mempertegas komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan PNFI sebagai sub sistem pendidikan nasional yang memiliki misi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan sistem persekolahan. Strategi PNFI lebih menekankan pada pemanfaatan kondisi yang riil agar warga belajar mampu dan mau memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kedudukan pendidikan non formal dan informal sebagai salah satu jalur pendidikan diarahkan untuk mampu membekali masyarakat sehingga mempunyai kehidupan yang lebih baik dengan mengangkat potensi – potensi yang ada dalam masyarakat sehingga mampu menghadapi krisis dan persaingan global yang sedang terjadi. Untuk itu peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan dan hal itu dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu. Mutu yang dimaksud bukan hanya memenuhi standart nasional tetapi juga perlu memenuhi standart



internasional. Peningkatan sumber daya manusia ini tidak hanya bagi warga masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan, tetapi juga diperuntukkan bagi petugas/tenaga pelaksana sampai di tingkat lapangan, sehingga diharapkan dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih handal dan profesional. Hal ini sebagai alternatif jawaban terhadap salah satu kendala yang dihadapi di berbagai daerah di Indonesia yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang profesional.

(b) Sejarah SKB Kota Malang

Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang berdiri pada tahun 1998 berdasarkan SK MENPAN RI No. B-82/I/1998, SK MENDIKBUD RI No. 39/O/1998 Tanggal 23 Februari 1998. Operasional SKB pertama kalinya menempati gedung SDN Ketawanggede III Kec. Lowokwaru, Malang. Tanggal 12 Juni 2003 pindah ke gedung baru di Jl. LA Sucipto Gg Makam No. 30 Kalisari, Malang. Berada di Area luas Tanah 9.220 m². Saat ini SKB Kota Malang berada di urutan 19 di Provinsi Jawa Timur.

(c) Visi Dan Misi SKB Kota Malang

Visi:

Terwujudnya masyarakat kota Malang yang gemar belajar, berusaha dan bekerja, berakhlak mulia, mandiri serta mampu beradaptasi dengan perubahan lokal dan global.



Misi:

- 1) Mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan
- 3) Mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan fungsional
- 4) Mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan

(d) FASILITAS SKB Kota Malang

- 1) 3 ruang kelas belajar
- 2) 1 ruang bengkel otomotif sepeda motor dan mobil
- 3) 1 ruang tata busana
- 4) 1 ruang kriya kayu
- 5) 1 ruang elektro dan music
- 6) 1 gedung tata boga (bagi paki dengan ruang sigi)
- 7) 1 ruang salon
- 8) 1 gedung PAUD
- 9) 1 gedung Asrama (24 kamar/2 orang)
- 10) 1 ruang kepala
- 11) 1 ruang pamong belajar
- 12) 1 ruang tamu



- 13) 1 ruang tata usaha
- 14) 1 ruang laboratorium bahasa
- 15) 1 ruang ICT/ICDL
- 16) 2 ruang kamar mandi
- 17) 1 ruang kamar mandi untuk karyawan

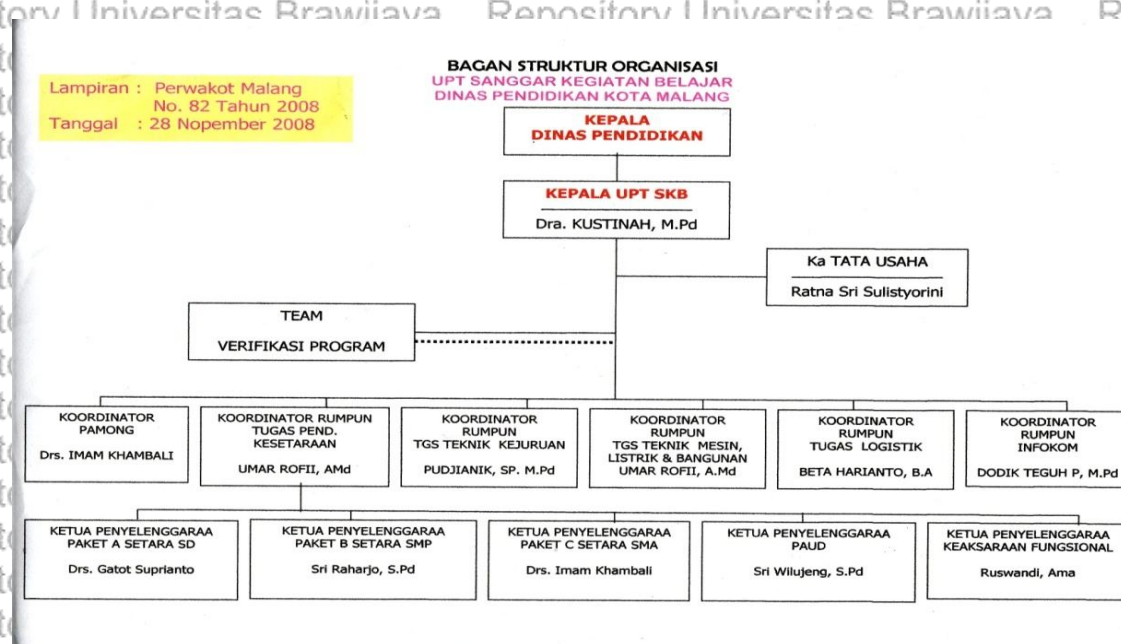
(e) Program SKB KOTA Malang

- 1) Pendidikan PAUD
- 2) Pendidikan Kesetaraan (kejar pkaet A, B, C)
- 3) Pelatihan anak jalanan (otomotif mobil, mengemudi, elektro)

(f) Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang

Gambar 5

Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang



Sumber: Data Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang



4. Gambaran Program Pelatihan Anak Jalanan

Di tahun 2010 Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang memiliki program pelatihan untuk anak jalanan. Dalam program ini anak jalanan diberi keterampilan sebagai bekal supaya anak jalanan bisa hidup mandiri dan tidak hidup di jalan lagi.

Program-program pembinaan anak jalanan itu yaitu:

- a. Pelatihan otomotif
- b. Pelatihan elektronika
- c. Pelatihan kursus mengemudi

Latar belakang dari program-program ini adalah masalah kesejahteraan sosial cenderung perkembangannya semakin meningkat kompleksitas dan jumlah permasalahan yang tercermin dari kecenderungan sebagai berikut :

- a. Gejala Kemiskinan semakin terpusat di kantong-kantong kemiskinan perkotaan akibat dari sistem sosial, ekonomi, politik, maupun hukum yang kurang mendukung terhadap keberdayaan mereka.
- b. Kecenderungan bentuk keluarga kecil di masa datang dan semakin banyaknya jumlah ibu yang berkerja di luar rumah akan berdampak pada pola hubungan keakraban dalam keluarga berdampak pada ketelantaran anak.
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia pada umumnya belum tercukupi, ini dapat dilihat dari penghasilan keluarga tidak terlalu besar menimbulkan tumbuh kembang anak tidak terpenuhi mengakibatkan anak ikut membantu menambah penghasilan



keluarga dengan mencari nafkah di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.

Dasar Pelaksanaan program ini adalah Dokumen Pelaksanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang Nomor 188.45/37.35.73.112/2010 tanggal 29 Januari 2010. Sumber Dana program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2010. Kegiatan program ini bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang sebagai mitra Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.

Adapun tujuan dari kegiatan Pelatihan yang diberikan bagi Anak Jalanan di Wilayah Kota Malang Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan program pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan ketrampilan bagi Anak Jalanan oleh UPT Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.
- b. Meningkatkan ketrampilan dan kemauan bekerja bagi Anak Jalanan agar mempunyai nilai tambah, dan mereka dapat berfungsi secara fajar, positif dan normatif serta produktifitas di keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- c. Mengurangi jumlah PMKS khususnya Anak Jalanan di Kota Malang dengan memberdayakan mereka dan, memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup mandiri mereka.
- d. Memberikan pelatihan bagi Anak Jalanan agar mereka mempunyai ketrampilan khusus yang diharapkan dapat digunakan untuk mencari



kerja ataupun membuka lapangan usaha sendiri sehingga mereka bisa hidup lebih mandiri.

e. Dengan bantuan stimulant yang akan diberikan, diharapkan para peserta pelatihan akan membuka lapangan usaha sendiri baik secara mandiri atau kelompok.

Sasaran program Pelatihan yang diberikan kepada Anak Jalanan di Wilayah Kota Malang tahun 2010 yang diikuti sebanyak 120 orang, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini dapat memiliki kemampuan atau keahlian khususnya Mengemudi, Elektronika, dan Otomotif.

Dibawah ini akan diuraikan pelaksanaan kegiatan program-program peningkatan keterampilan anak jalanan:

Pelaksanaan kegiatan pelatihan otomotif bagi anak jalanan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelatihan Otomotif bagi anak jalanan Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 15 Juni 2010.

b. Tempat kegiatan di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Jalan LA Sucipto Malang.

c. Peserta 50 Anak Jalanan dari Rumah Singgah yang dikelola LSM :

- 1) LSM Sadar Hati Jalan Simpang Barito I/2 Malang
- 2) LSM Griya Baca Jalan Kyai Tamin IC/20 Malang
- 3) LSM SPJM Jalan Muharto Gang VB Malang
- 4) LSM JKJT Jalan Blitar No 12 Malang

d. Instruktur/ Narasumber dari UPT Sanggar Kegiatan Belajar.



Pelaksanaan kegiatan pelatihan elektronika bagi anak jalanan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan di UPT Sosial Tahun 2010 dalam bentuk pelatihan elektronika dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 15 Juni 2010.
- b. Tempat kegiatan di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Jalan LA Sucipto Malang.
- c. Peserta 25 Anak Jalanan dari Rumah Singgah yang dikelola LSM:
 - 1) LSM Sadar Hati Jalan Simpang Barito I/2 Malang
 - 2) LSM Griya Baca Jalan Kyai Tamin IC/20 Malang
 - 3) LSM SPJM Jalan Muharto Gang VB Malang
 - 4) LSM JKJT Jalan Blitar No 12 Malang
- d. Instruktur/ Narasumber dari UPT Sanggar Kegiatan Belajar.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan mengemudi bagi anak jalanan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelatihan/ Kursus Mengemudi bagi anak jalanan Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 10 Juni 2010.
- b. Tempat kegiatan untuk teori mengemudi di UPT Sanggar Kegiatan Belajar Jalan LA Sucipto Malang, sedangkan untuk praktek mengemudi di Jalan Wilayah Kota Malang.
- c. Peserta 45 Anak Jalanan dari Rumah Singgah yang dikelola LSM:
 - 1) LSM Sadar Hati Jalan Simpang Barito I/2 Malang
 - 2) LSM Griya Baca Jalan Kyai Tamin IC/20 Malang
 - 3) LSM SPJM Jalan Muharto Gang VB Malang
 - 4) LSM JKJT Jalan Blitar No 12 Malang



d. Instruktur/ Narasumber dari UPT Sanggar Kegiatan Belajar.

e. Untuk ujian teori dan praktek mengemudi di Polresta Malang.

Strategi pelaksanaan kegiatan keterampilan sebagai berikut:

a. Orientasi Program Kegiatan dan Bimbingan Sosial

b. Penjelasan Teori

c. Latihan Praktek

Metode pembelajarannya sebagai berikut:

a. Pemaparan teori

b. Uji coba/praktek

c. Pemberian bimbingan/motivasi sosial

5. Relasi Pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

(a) Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan

Dalam mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam hal ini Dinas

Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dalam pembinaan anak jalanan, dapat

dilihat dari perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan anak jalanan.

Program pelatihan anak jalanan di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial

Kota Malang dibuat berpedoman pada UUD 1945. Dalam Pasal 34 UUD 1945 berbunyi:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.



- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Disini terlihat bahwa negara yang diwakili oleh pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan anak jalanan.

Bukan hanya UUD 1945 yang dijadikan pedoman, UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga dijadikan sebagai patokan dalam pembuatan program. Dalam Undang-Undang ini Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Sosial dalam undang-undang ini meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial
- 2) Jaminan sosial
- 3) Pemberdayaan sosial dan
- 4) Perlindungan sosial.

Dalam Renstra (Rencana Strategis) tahun 2009-2013 disebutkan pembinaan anak jalanan itu diatur dalam Kebijakan Eksternal yang isi Kebijakannya yaitu :

- 1) Membuka lapangan kerja baru
- 2) Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi tenaga kerja setempat
- 3) Sosialisasi peraturan, pembinaan dan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- 4) Melaksanakan pemulangan orang terlantar ke Daerah asal dan penyuluhan HIV/AIDS
- 5) Meningkatkan pembinaan, bimbingan, pelatihan bagi penyandang cacat, anak jalanan, dan Wanita Tuna Susila
- 6) Menyediakan pelatihan bagi anak jalanan
- 7) Melaksanakan pengiriman, penampungan bimbingan bagi anak anjal, razia gepeng, WTS dan TWK.



Berikut ini program, kegiatan dan indikator kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang:

Tabel 5
Kegiatan dan Indikator Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

No.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran
1.	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Bimbingan dan pelatihan Bordir bagi pembimbing penyandang cacat	peningkatan jumlah anak cacat yang di bina	Terlaksananya bimbingan dan terwujudnya kemandirian anak cacat
2.	Pembinaan panti asuhan /panti jompo Pembinaan para penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Upaya pencegahan penyalagunaan Narkoba	Pelatihan dasar Otomotif dan belajar mengemudi bagi anak jalanan Sosialisasi dan pemberian bantuan pada anak panti asuhan dan panti jompo	peningkatan kualitas dan ketrampilan bagi anak panti asuhan dan panti jompo, anak jalanan	Terlaksananya bantuan dan terbentuknya anak jalanan/anak panti/jompo yang mandiri dan berketrampilan
3	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Bimbingan lanjut hasil operasi Rasia gepeng, anjal dan WTS Pengiriman PMKS dan PSKS ke panti – panti sosial Rujukan di Propinsi Jatim	Penurunan anak anjal, gepeng dan WTS di Jalanan	Terbentuknya tertib anak anjal , rasia gepeng dan WTS pada tempatnya

Sumber: Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

(b) Peran LSM Dalam Pembinaan Anak Jalanan

Menangani anak jalanan tidak akan bisa dilakukan sendirian (hanya pemerintah saja), perlu adanya pihak-pihak lain yang ikut membantu dalam menangani anak jalanan. Dalam UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 20 disebutkan “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dilanjutkan pada pasal 27 yang berbunyi “(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, **lembaga swadaya masyarakat**, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”. Intinya yang berperan disini bukan hanya pemerintah saja tetapi semua pihak harus ikut serta dalam pembinaan anak jalanan di khususnya untuk LSM yang bergerak dibidang Sosial.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam gambaran umum dari LSM “Griya Baca” bagaimana visi misi, fungsi dan tujuan dari adanya LSM “Griya Baca” dimana ikut membantu dalam menangani anak Jalanan. LSM “Griya Baca” sudah berdiri dari tahun 2006, hampir 5 tahun LSM ini sudah berdiri. Dalam hal menangani anak jalan peneliti mewawancarai Hamdani Koordinator LSM “Griya Baca” yang diwawancarai pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 pada pukul 17.00 WIB yaitu

“LSM “Griya Baca” memiliki program kerja setiap tahunan dalam menangani anak jalanan sesuai dengan fungsi dan tujuan dari LSM “Griya Baca”. Pembinaan yang dilakukan oleh LSM “Griya Baca” bersifat penampungan sementara buat anak jalanan dimana anak jalanan



tertetap bekerja dijalanan. LSM “Griya Baca” juga memberikan keterampilan kepada anak jalanan sesuai dengan visi misi dari LSM “Griya Baca”.

Adanya LSM juga disambut baik oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Menurut Ibu Dra. Pipih Triastuti, selaku Kepala Bidang Sosial, yang di wawancarai pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 pada pukul 12.30 WIB yaitu:

“Saya merasa senang dengan adanya LSM ini. Peran LSM ini sangat penting, tidak mungkin menangani anak jalanan hanya pemerintah saja. Kita selalu mengikut sertakan setiap LSM yang bergerak dibidang sosial di Kota Malang dalam setiap program kerja Dinas Ketenagakerjaan dan sosial Kota Malang karena Masalah sosial bukan tanggung jawab pemerintah dan jangan dibebani dengan pemerintah saja. Masyarakat juga berperan dalam hal ini khusus LSM ini.”

(c) Pola Relasi Pemerintah dengan LSM dalam Program Pelatihan

Anak Jalanan

Dalam melaksanakan program pelatihan anak jalanan pemerintah menggunakan beberapa alur dalam program pelatihan anak jalanan. Alur program pelatihan Menurut Ibu Dra. Pipih Triastuti, selaku Kepala Bidang Sosial, yang di wawancarai pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 pada pukul 12.30 WIB yaitu:

“Pertama mengadakan seleksi ke LSM, menawarkan kepada LSM ada program, seleksi kepada anak jalanan prioritas warga kota malang. Misalnya jatahnya 40 diambil dr rumah singgah itu, di malang ada 4 rumah singgah. Yang diambil anak jalannya yang betul-betul minat. Disini soal pelatihan keterampilan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang bermitra dengan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). SDM pengajar diambil dari SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) merupakan bentuk kerja sama, disitu ada instruktur ada alatnya dalam pelatihan. Dinas sosial hanya sebagai perancang program dan bentuk pelatihannya bekerja sama dengan SKB. Bentuk kerja sama ini terjadi berupa tender. Siapa yang memenuhi syarat kelayakan dalam melaksanakan program dan anggaran yang sesuai maka akan diambil untuk bekerja sama. Dinas



ketenagakerjaan dan sosial disini hanya sebagai panitia. Panitia ini diatur melalui Surat Keputusan (SK).”

Dalam memaparkan alur program pelatihan ini peneliti juga mewawancarai Hamdhani selaku Koordinator LSM “Griya Baca” pada hari Senin Tanggal 2 Mei 2011 pukul 18.00 WIB yang hasilnya sebagai berikut:

“dalam alur program pelatihan anak jalanan ini, kami sebagai LSM ditawarkan apakah mau mengikuti program pelatihan anak jalanan sesuai dengan ketentuan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, jika mau maka disini LSM hanya sebagai penyedia anak jalanan yang akan dikirim untuk program pelatihan anak jalanan”

Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan SKB adalah pelaksana (penyelenggara) program pelatihan anak jalanan, dimana SKB yang melaksanakan program dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Malang, Program diberikan, SKB punya sarana dan fasilitasnya (ini yang melaksanakan kegiatan) diklat yang melaksanakan SKB, program yang memiliki Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Ditegaskan Menurut Dodik Teguh P, M.Pd selaku Koordinator Rumpun Infokom UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 pada pukul 12.00 WIB sebagai berikut:

“SKB disini sebagai pelaksana dari program pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Semua peralatan, media, fasilitas penunjang pelatihan ada di SKB, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial tidak memiliki fasilitas penunjang pelatihan. Dari instruktur/tentor pengajar dari SKB, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial disini sebagai pembuat program. Bentuk kerjasama disini seperti kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, kita ini mengikuti tender dalam program pelatihan anak jalanan dan akhirnya memenangkan tender ini”

Program pelatihan anak jalanan ini, pemerintah melakukan hubungan dengan beberapa LSM dalam pelatihan anak jalanan. Hubungan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dengan LSM. Menurut Ibu Dra. Pipih Triastuti,



selaku Kepala Bidang Bidang Sosial, yang di wawancarai pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 pukul 12.30 WIB yaitu:

“Saya merasa senang dengan adanya LSM ini. Peran LSM ini sangat penting, tidak mungkin menangani anak jalanan hanya pemerintah saja. Masalah sosial bukan tanggung jawab pemerintah dan jangan dibebani dengan pemerintah saja. Masyarakat juga berperan dalam hal ini khusus LSM ini.”

Hubungan antara Pemerintah dengan LSM menghasilkan suatu kerjasama. Bentuk kerjasama antara dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dengan

LSM yang bergerak dibidang Pemberdayaan anak jalanan. Menurut Ibu Dra. Pipih Triastuti, selaku Kepala Bidang Sosial, yang di wawancarai pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 pada pukul 12.30 WIB yaitu :

“LSM hanya sebagai mitra pembinaan anak jalanan saja, yg penting untuk membangun anak jalanan supaya lebih maju. LSM kan mitra kita supaya bisa mengentaskan masalah sosial ini, LSM disini juga harus ikut serta dalam pembinaan karena LSM sendiri punya cara dalam membina anak jalanan.”

Ada beberapa LSM yang bekerjasama dengan Pemerintah. Beberapa LSM yang bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Menurut Titis Indarwati S.AP, selaku staf Bidang Sosial, yang di wawancarai pada hari Senin tanggal 18 April 2011 pada pukul 10.00 WIB yaitu:

“Ada beberapa LSM yang bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yaitu (1) Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKTI), Jl Blitar No.12 Malang, (2) Griya Baca, Jl Kyai Tamin 1C/20,(3) LSM Sadar Hati, Jalan Simpang Barito 1/2 Malang, (4) LSM SPJM, Jalan Muharto Gang VB Malang.”

Dalam melakukan kerjasama dengan LSM, pemerintah menerapkan beberapa syarat kepada LSM. Syarat-syarat apabila LSM bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang Menurut Titis Indarwati S.AP,



selaku staf Bidang Sosial, yang di wawancarai pada hari Senin tanggal 18 April 2011 pukul 10.00 WIB yaitu:

- 1) LSM yang bergerak di bidang sosial khusus yang menangani anak jalanan dan gepeng
- 2) LSM yang sudah terdaftar, memiliki akte notaris dan pengurus lengkap.

6. Program Pelatihan Anak Jalanan

(a) Proses Perencanaan Program Pelatihan Anak Jalanan

Perencanaan program pelatihan anak jalanan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang sebelum pelaksanaan pelatihan berdasarkan rambu-rambu dan petunjuk dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.

Untuk mengetahui proses perencanaan program pelatihan anak jalanan, peneliti mengambil beberapa responden untuk diwawancarai. Menurut Ibu Dra. Pipih Triastuti, selaku Kepala Bidang Bidang Sosial, yang di wawancarai pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 pada pukul 12.30 WIB yaitu:

“Pertama Pemerintah Kota Malang mengucurkan anggaran melalui APBD Kota Malang yang digunakan untuk pembinaan anak jalanan. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial menerima mandat tersebut dan mencari pembinaan apa yang akan dilakukan untuk membina anak jalanan. Setelah dicari terbentuklah program pelatihan buat anak jalanan. Setelah itu kita tawarkan ke LSM, bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang mempunyai program pelatihan untuk anak jalanan. LSM mana saja yang setuju berpartisipasi dalam program ini harus mengirimkan anak jalanan yang berada dibawah perlindungan mereka untuk ikut dalam pelatihan tapi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Untuk penyeleksian anak jalannya diserahkan pada LSM masing-masing khususnya diserahkan kepada koordinator masing-masing LSM. Sedangkan pelaksanaan program pelatihan diserahkan kepada SKB kota Malang sebagai penyelenggara program pelatihan”

Untuk menambah data tentang proses perencanaan program pelatihan anak jalanan, peneliti juga mewawancarai koordinator LSM “Griya Baca”.



Menurut Hamdani selaku Koordinator “Griya Baca” yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 pukul 17.00 WIB sebagai berikut:

“Kita dalam program ini hanya sebagai penyedia anak jalanan, disini kami ditugaskan sebagai penyeleksi anak jalanan yang akan dikirimkan ke program pelatihan. Anak yang dikirimkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dinas ketenagakerjaan dan Sosial, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tentukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.”

Peneliti juga mewawancarai pihak dari SKB kota Malang dalam mendapatkan data proses perencanaan program pelatihan anak jalanan. Menurut Dodik Teguh P. M.Pd selaku Koordinator Rumpun Infokom UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 pukul 12.00 WIB sebagai berikut:

“SKB disini sebagai pelaksana dari program pelatihan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Semua peralatan, media, fasilitas penunjang pelatihan ada di SKB, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial tidak memiliki fasilitas penunjang pelatihan. Dari instruktur/tutor pengajar dari SKB, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial disini sebagai pembuat program saja.”

Dalam proses perencanaan ini, terdapat empat langkah utama penyusunan rencana program kegiatan pelatihan anak jalanan yang dilakukan oleh pihak SKB Kota Malang:

Pertama, Menyusun proposal kegiatan pelatihan, yang diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Menurut Dra. Kustinah, M.Pd Kepala UPT SKB kota Malang yang diwawancarai pada hari Rabu 27 april 2011 pukul 11.00 WIB:

“Penyusunan proposal pelatihan dibuat berdasarkan alokasi dana yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang selaku pembuat program pelatihan anak jalanan untuk pelatihan dengan kapasitas anak jalanan yang telah ditentukan. Kegiatan pelatihan tergantung dengan dana yang disediakan. Setelah proposal tersusun



dikirim ke Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, dipelajari dan disetujui oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, kemudian baru dana operasional ke luar (cair) untuk pelaksanaannya.”

Kedua, Merekrut peserta didik (diserahkan kepada LSM yang bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang) dan tutor.

Seperti yang dijelaskan Hamdani selaku Koordinator “Griya Baca” diatas bahwa penyedia anak jalannya adalah LSM dengan cara menseleksi anak jalanan yang layak untuk diikutsertakan dalam pelatihan anak jalanan dan diserahkan kepada SKB Kota Malang untuk dilatih.

Ketiga: Menyusun kurikulum dan silabus pelatihan dan jadwal kegiatan pelatihan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. SKB disini sudah memiliki kurikulum dan silabus pelatihan dikarenakan SKB merupakan pusat pendidikan belajar non-formal dibawah naungan Dinas Pendidikan dimana terdapat sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan. Seperti yang dijelaskan Dodik Teguh P, M.Pd selaku Koordinator Rumpun Infokom SKB Kota Malang yang diwawancarai pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 pukul 12.30 WIB sebagai berikut:

“SKB merupakan lembaga pendidikan *non-formal* seperti pendidikan kursus dibawah naungan Dinas Pendidikan. SKB memiliki berbagai sarana dan prasaran penunjang dalam pelatihan. Ada kurikulumnya, ada tentornya (pengajar), ada ruang lab dalam mempraktekkan teori yang telah dijelaskan. Semua fasilitas penunjang buat pelatihan ada semua di SKB Kota Malang.”

Empat: Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini dijelaskan oleh Dodik Teguh P, M.Pd selaku Koordinator Rumpun Infokom SKB Kota Malang yang diwawancarai pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 pukul 12.30 WIB:



“...untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Rencana itu sesuai dengan kehendak dan keinginan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dalam bentuk pelatihannya. Dan juga sesuai dengan proposal yang telah dikirim oleh SKB, disetujui dan disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.”

(b) Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan

Dalam pelaksanaan program pelatihan anak jalanan, peneliti mengambil beberapa responden, dimana responden ini lebih mengetahui proses pelaksanaan program pelatihan anak jalanan.

Menurut Dodik Teguh P, M.Pd selaku Koordinator Rumpun Infokom UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 pukul 12.30 WIB sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pelatihan seperti pelatihan otomotif, elektronika dan mengemudi semuanya dilaksanakan di SKB. SKB disini sebagai pelaksana program dari Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dikarenakan yang mempunyai fasilitas pelatihan yang bisa menunjang program adalah SKB, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial tidak mempunyai fasilitas penunjang pelatihan.”

Dalam proses pembelajaran (pelatihan) responden menerapkan beberapa metode pembelajaran yang satu sama lain saling menunjang dan tak dapat dipisahkan. Menurut Umar Roffi, A.Md Koordinator Rumpun Tugas Teknik Mesin, Listrik dan Bangunan hari Senin tanggal 2 Mei 2011 pada pukul 09.00 WIB yaitu:

“Pada saat pelatihan instruktur menyampaikan materi yang bersifat teori seperti teori tentang mesin menggunakan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan metode Tanya jawab. Metode ceramah dan Tanya jawab ini cukup efektif untuk memberikan bahan ajaran tentang teori-teori dalam penyampaian materi pelatihan. Setelah menyampaikan materi secara ceramah dan Tanya jawab, peserta pelatihan dibawa ke tempat praktek pelatihan misalnya otomotif prakteknya ke bengkel motor.



Setelah peserta pelatihan dianggap telah mengerti dan memahami materi maka peserta pelatihan disuruh melakukan secara berkelompok tentang penerapan materi yang telah diberikan. Intinya dalam proses pelatihan mayoritas instruktur menggunakan 5 metode yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, kerja kelompok dan tugas menyampaikan materi yang bersifat praktek. Dalam penyampaian pelajaran instruktur menggunakan media seperti gambar dan skema agar membenau peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan.”

Pada saat mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di dalam kelas para instruktur menggunakan metode demonstrasi dan kerja kelompok. Kedua metode tersebut digunakan secara berurutan, pertama instruktur mendemonstrasikan cara-cara mengoperasikan mesin, sedangkan peserta didik memperhatikan dengan seksama apa yang dipertunjukkan oleh instruktur sambil mencatat hal-hal yang belum dipahami. Dengan demontrasi, ada diantara peserta didik yang belum memahami, apabila dilakukan hanya 1 (satu) kali. Oleh karena itu bagi peserta yang demikian para instruktur melakukan demonstrasi sebanyak 2 atau 3 kali baru semua peserta didik dapat memahami materi yang telah didemonstrasikan. Apabila semua peserta dianggap telah mengerti dan memahami tentang materi yang telah didemonstrasikan, maka peserta didik disuruh melakukan secara berkelompok tentang bongkar pasang mesin, sambil dipandu oleh instruktur.

Dalam melakukan kerja kelompok misalnya pelatihan otomotif peserta diberitahukan tentang komponen-komponen mesin yang belum mereka kenal.

Kerja kelompok pun dilakukan berulang-ulang kali (2 atau 3 kali) sehingga peserta didik benar-benar terampil dalam bongkar pasang mesin. Setelah mereka mahir dalam bongkar pasang mesin, didemonstrasikan pula tentang cara

mendeteksi dan memperbaiki kerusakan mesin, kemudian disuruh mempraktekan secara individual atau berkelompok.

Dengan menggunakan metode demonstrasi dan kerja kelompok, cukup efektif dan efisien dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bersifat praktek, karena dengan metode ini peserta dapat melakukan sesuatu yang reel (nyata) dan sekaligus dapat memanipulasi (mengotak-atik) benda-benda atau alat-alat pembelajaran secara langsung. Hal ini sesuai dengan teori belajar yang bersifat konkrit-manipulatif (Srini M. Iskandar :1997).

Dengan demikian proses pembelajaran atau pelatihan dengan menggunakan metode demonstrasi dan kerja kelompok (eksperimen) merupakan metode yang cukup relevan untuk diterapkan karena dengan metode ini di samping memudahkan peserta didik belajar dapat mengaktifkan dan menggairahkan mereka dalam proses pembelajaran.

Adapun media pembelajaran yang digunakan pada saat menyampaikan teori adalah gambar dan skema. Dengan menggunakan alat ini telah dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Hal ini terbukti pada saat mereka mempraktekkan materi tersebut di laboratorium, ternyata peserta didik dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh instruktur. Pada waktu praktek di Laboratorium media yang digunakan adalah gambar skema, atau mesin dan lain-lain.

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap tentang proses pelaksanaan pelatihan anak jalanan ini, peneliti mewawancarai pula peserta didik yang mengikuti pelatihan.



Menurut Hendro Romadhon, peserta didik dari Griya Baca yang diwawancari pada tanggal 31 April 2011 pukul 13.00 WIB sebagai berikut:

“cara atau metode mengajar yang digunakan instruktur cukup dapat dimengerti dan dipahami sehingga mudah diaplikasikan dalam praktek di tempat praktek (lab). Para instruktur mengajar dengan suasana keakraban dan kekeluargaan (informal), di samping kami memperoleh pengetahuan dan keterampilan, juga dapat bersosialisasi dengan baik sesama teman yang berasal dari berbagai tempat di Malang”

Pendidikan dan pelatihan yang diperoleh di SKB Kota Malang merupakan pendidikan terpadu yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan mendidik sikap mental yang baik dan berguna sebagai anggota masyarakat kelak.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang telah dapat berjalan lancar dan baik, sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik misalnya sebagai calon montir otomotif yang kreatif, produktif, inovatif dan mandiri di kemudian hari.

Untuk melengkapi data atau informasi tentang proses pelaksanaan pembelajaran dan (pelatihan) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang maka peneliti mewawancara peserta didik yang lain yaitu Hariono yang diwawancarai pada Hari Sabtu tanggal 30 April 2011 Pukul 12.30 sebagai berikut:

“Proses pembelajaran dan pelatihan yang diberikan oleh instruktur kepada kami cukup bisa dimengerti dan dipahami, karena teknik dan metode pelatihan yang digunakan cukup menarik dan simpati, sehingga kami merasa betah dan enjoy belajar dan berlatih baik di dalam kelas maupun di luar kelas (di bengkel motor atau mobil).”



Cara penyampaian materi pelatihan yang digunakan instruktur mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, Dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab kami diberikan materi pelatihan. Kedua, Instruktur mendemonstrasikan tentang cara-cara seperti membongkar dan memasang mesin kendaraan sambil memperkenalkan kembali komponen mesin tersebut. Ketiga, Instruktur menyuruh peserta didik mencoba membongkar dan memasang komponen mesin sambil dibimbing oleh instruktur. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang kali, sehingga peserta didik mahir bongkar pasang mesin. Keempat, Instruktur memperkenalkan kepada peserta tentang beberapa kelainan atau kerusakan mesin, baik kerusakan yang sederhana maupun kerusakan yang cukup kompleks dan bagaimana cara memperbaikinya..

Keempat langkah proses pelatihan tersebut, dilakukan oleh instruktur dan diikuti dengan seksama oleh peserta didik secara berulang kali sehingga peserta didik mahir dan terampil dalam mengenal, mendeteksi dan memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.

(c) Hasil Program Pelaksanaan Pelatihan Anak Jalanan

Secara keseluruhan program pelatihan untuk Memahami dasar-dasar Keterampilan Mengemudi, Elektronika, dan Otomotif. Dengan ketrampilan tersebut, peserta memiliki modal dasar untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan dan langsung melaksanakan kegiatan praktek yang nantinya mereka mampu bekerja ataupun membuka usaha sendiri.

Di bawah ini Hasil Laporan Pelatihan Otomotif, Elektronika dan Mengemudi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang:



Tabel 6

Laporan Pelatihan Otomotif, Elektronika dan Mengemudi

No.	Program Pelatihan	Hasil Pelatihan
1.	Pelatihan Otomotif	• Pembinaan Anak Jalanan dalam bentuk pelatihan Otomotif sebanyak 50 Anak Jalanan. • Peserta pelatihan mendapatkan materi dan perlengkapan alat tulis masing-masing anak sebanyak 1 paket. • Peserta pelatihan mendapatkan snack, makan dan minum • Peserta pelatihan mendapatkan uang transport Rp. 25.000,-/hari per anak selama pelatihan. • Peserta mendapatkan peralatan praktek pelatihan termasuk tolkit. • Peserta mendapatkan bantuan modal kerja sebesar Rp. 1.500.000,-/anak jalanan.
2.	Pelatihan Elektronik	• Terlaksananya Pembinaan Anaka Jalanan dalam bentuk pelatihan/ Kursus Elektronik sebanyak 25 Anak Jalanan. • Peserta pelatihan mendapatkan materi dan perlengkapan alat tulis masing-masing anak sebanyak 1 paket. • Peserta pelatihan mendapatkan snack, makan dan minum. • Peserta pelatihan mendapatkan uang transport Rp. 20.000,- per anak selama pelatihan. • Peserta mendapatkan peralatan praktek pelatiha termasuk tolkit.
3.	Pelatihan Mengemudi	• Terlaksananya Kegiatan Pelatihan/ Kursus Mengemudi bagi anak jalanan Tahun 2010. • Peserta pelatihan yang mengikuti teori dan praktek mengemudi sebanyak 45 Anak Jalanan. • Peserta pelatihan yang mendapatkan SIM A sebanyak 17 Anak Jalanan. • Peserta pelatihan mendapatkan uang transport Rp. 17.500,-/hari per anak selama pelatihan. • Peserta mendapatkan snack, makan dan minum.

Sumber: Laporan Kegiatan Pelatihan Mengemudi, elektronika dan otomotif bagi Anak Jalanan di Kota Malang



Menurut Drs. Hendro Sutoyo, MM selaku Kasi Rehsos Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial yang diwawancarai pada hari Jum'at, tanggal 29 April 2011 pukul 10.00 dalam hal Hasil Program Pelatihan ini yaitu

“hasil pelatihan anak jalanan ini semuanya sudah ditulis dalam Laporan Pertanggungjawaban, detail dijelaskan dalam laporan itu. Untuk pelatihan otomotif, diikuti sebanyak 50 orang dan yang lulus 50 orang juga, untuk pelatihan elektronika diikuti oleh 25 anak dan semuanya lulus juga. Hanya pelatihan mengemudi diikuti oleh 45 orang tapi yang lulus hanya 17 orang. Ini dikarenakan adanya kenakalan yang dilakukan oleh peserta pelatihan, dimana yang seharusnya merupakan warga dan harus asli kota Malang tetapi ternyata warga kabupaten Malang serta adanya pengalihan kewajiban, dimana yang seharusnya mengikuti pelatihan ini adalah anak jalanan yang terdata tetapi dilimpahkan ke orang lain untuk ikut dalam pelatihan ini”.

Untuk melengkapi data hasil pelaksanaan pelatihan anak jalanan setelah pelatihan itu selesai, peneliti mewawancarai ibu Dra. Pipih Triastuti, selaku Kepala Bidang Sosial, yang diwawancarai pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 pada pukul 13.00 WIB sebagai berikut:

“...pelatihan anak jalanan yang kita lakukan dilihat dari segi pelaksanaan bisa kita katakan berhasil, tetapi dari segi dampak kegiatannya tidak begitu berhasil karena setelah pelatihan tersebut anak jalanan yang dilatih masih saja menggantungkan nasibnya di jalan. Program pelatihan itu tidak digunakan oleh anak jalanan. *Mind set* anak jalanan adalah uang, uang dan uang dengan cepat. Caranya harus diubah *Mind set* mereka dulu agar pikiran mereka tidak melulu bagaimana menghasilkan uang dengan cara cepat.”

Untuk mendapatkan data yang lebih banyak peneliti juga mewawancarai Hamdani selaku koordinator LSM “Griya Baca” pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 pukul 17.00 WIB sebagai berikut:

“anak jalanan yang setelah dibina melalui program pelatihan anak jalanan sebagai besar hasilnya tidak memuaskan. Tidak ada perubahan sedikitpun bagi anak jalanan yang dilatih dalam program tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani jalanan sudah benar tapi sayangnya pemerintah disini kurang tahu program pelatihan apa yang dibutuhkan oleh anak jalanan sehingga program itu



bisa bermanfaat bagi anak jalanan tersebut. Tidak adanya kerjasama antar sektor setelah pelatihan itu selesai membuat program pelatihan ini tidak bermanfaat apa-apa bagi anak jalanan yang ikut pelatihan. Seharusnya setelah pelatihan ini Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial bekerjasama dengan bengkel-bengkel atau tempat-tempat kerjaan yang lain agar anak jalanan yang telah mengikuti program pelatihan dipekerjakan disitu. Kalau hanya pelatihan saja maka tidak akan berdampak banyak bagi anak jalanan yang telah dibina. Perubahan *mind set* dirasa juga perlu, sebelum pelatihan diselenggarakan adanya suatu pelatihan yang mengubah *mind set* anak jalanan kearah yang lebih baik, sehingga pikiran anak jalanan bisa terbuka”

B. Pembahasan

Hasil Penelitian yang telah didapat selama proses penelitian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian. Hasil Penelitian tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara, studi kepustakaan dan juga observasi terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Relasi yang terjadi antara pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dilihat dari seberapa besar peranan pemerintah dan LSM dalam pembinaan anak jalanan serta pola relasi yang digunakan pemerintah dengan LSM dalam pembinaan anak jalanan. Hal penting dalam hubungan antara pemerintah dengan LSM dilihat dari peraturan pemerintah yang dibuat. Menurut Faringgton dan Bebbington dalam Suharko (2005:39), legislasi pemerintah dalam pembangunan biasanya bersifat regulatif. Pemerintah dan LSM, masing-masing mempunyai strategi dan sikap kebijakan sendiri-sendiri. Strategi dan sikap kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.



(a) Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di manapun, Administrasi Publik akan memainkan sejumlah peran penting diantaranya dalam menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya Negara yakni kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia misalnya, tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Acuan setiap program yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan UUD 1945. Seperti halnya program-program yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang khususnya program tentang pelatihan anak jalanan.

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara dan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Ini dimaksudkan sebagai bahwa peran pemerintah disini sangat penting dan bertanggung jawab dalam pembinaan anak jalanan. Frederick A.Clevend justru menunjukkan peran administrasi publik sangat vital dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Katanya, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya. Rondinelli (2007) mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan kepada melayani masyarakat agar menjadi



democratic government. Dalam hal ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik dan swasta.

Pemerintah dituntut lebih kepada ke arah pelayanan (pemberdayaan) yang lebih berkualitas.

UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga dijadikan sebagai patokan dalam pembuatan program. Penyelenggaraan Sosial dalam undang-undang ini meliputi:

1) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial disini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

- a) Motivasi dan diagnosis psikososial
- b) Perawatan dan pengasuhan
- c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d) Bimbingan mental spiritual
- e) Bimbingan fisik
- f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g) Pelayanan aksesibilitas
- h) Bantuan dan asistensi sosial
- i) Bimbingan



j) Bimbingan resosialisasi

k) Bimbingan lanjut dan/atau

l) Rujukan

2) Jaminan sosial

Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

a) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

b) Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

c) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

3) Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

a) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

b) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Pemberdayaan sosial dimaksud dilakukan melalui:

- a) Peningkatan kemauan dan kemampuan
- b) Penggalan potensi dan sumber daya
- c) Penggalan nilai-nilai dasar
- d) Pemberian akses dan/atau
- e) Pemberian bantuan usaha.

Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:

- a) Diagnosis dan pemberian motivasi
- b) Pelatihan keterampilan
- c) Pendampingan
- d) Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
- e) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha
- f) Supervise dan advokasi sosial
- g) Penguatan keserasian sosial
- h) Penataan lingkungan dan/atau
- i) Bimbingan lanjut.

Dan juga pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:

- a) Diagnosis dan pemberian motivasi
- b) Penguatan kelembagaan masyarakat
- c) Kemitraan dan penggalangan dana dan/atau
- d) Pemberian stimulan.



4). Perlindungan sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui:

a) Bantuan sosial: dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial ini dalam bentuk:

(1) Bantuan langsung

(2) Penyediaan aksesibilitas

(3) Penguatan kelembagaan

Dalam Renstra (Rencana Strategis) tahun 2009-2013 Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang disebutkan dalam Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yaitu Menyediakan pelatihan bagi anak jalanan dengan tujuan peningkatan kualitas dan ketrampilan bagi anak jalanan.

Stoker dalam Kurniawan (2004:2) adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik, seperti membangun dengan lebih baik sekolah, rumah, saluran pembuangan serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politisi. Dalam menyediakan pelayanan yang demikian, Administrasi Publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama. Disini



peran pemerintah hanya sebagai regulator dimana membuat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

(b). Peran LSM Dalam Pembinaan Anak jalanan

Dalam rangka pembinaan anak jalanan, pemerintah tidak bertindak sendirian. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan melalui partisipasi masyarakat secara langsung maupun secara formal melalui peran Lembaga Swadaya Masyarakat. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak membebankan kepada beberapa pihak untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik kewajiban dan tanggung jawab. Memberikan perlindungan disebutkan dalam pasal 20 Undang-undang perlindungan anak yaitu “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dalam pasal 72 disebutkan “(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

LSM memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah negara. Noleen Heyzer dalam Gaffar (1999:203) mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dimainkan oleh berbagai LSM, yaitu:

- 1) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “grassroots”, yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.



- 2) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerja sama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
- 3) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Peran dari LSM “Griya Baca” dapat dilihat dari Fungsi, Tujuan, dan pembinaan yang dilakukan. Fungsi LSM “Griya Baca” disebutkan dalam gambaran Umum yaitu :

- 1) Menjadi lembaga swadaya masyarakat yang secara rutin memberikan pembinaan akademik dan non akademik kepada anak jalanan
- 2) Mendampingi dan mengarahkan anak jalanan untuk menemukan jati diri dan cita-citanya
- 3) Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak jalanan memiliki hak yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia sehingga keberadaannya bukan untuk dimarginalkan.
- 4) Memberdayakan anak jalanan dengan penggalian potensi yang mereka miliki dan memfasilitasinya untuk kembali ke sektor formal
- 5) Menjadi lembaga yang mengadvokasi dan memberikan perlindungan dalam bentuk pendampingan yang bersahabat

Dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral kepada anak jalanan
- 2) Menumbuhkan kebiasaan yang positif kepada anak jalanan sebagai langkah awal untuk berubah tanpa ada rasa pemaksaan



3) Memberikan pendidikan yang cukup kepada anak jalanan sehingga dapat terbebas dari kebodohan dan buta huruf melalui pembinaan yang berkelanjutan.

4) Memberikan penyadaran ke masyarakat luas untuk berparadigma positif ke anak jalanan dan dapat mau berkontribusi dalam penyelesaiannya.

Pembinaan yang dilakukan oleh LSM “Griya Baca” adalah anak-anak jalanan yang masuk ditampung dan diberikan pelayanan seperti makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari para pekerja sosial. Dalam LSM “Griya Baca” juga disediakan fasilitas pendidikan, ketrampilan, kesehatan, kebutuhan dasar dan pekerjaan. Penampungan di LSM “Griya Baca” ini bersifat sementara artinya anak-anak jalanan hanya tinggal dipenampungan untuk sementara waktu dan aktifitas anak-anak tersebut masih berada di jalanan.

Dalam hal berkerjasama sama dengan pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang), LSM “Griya Baca” selalu diikutsertakan dalam program kerja yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang khususnya dalam Program Pelatihan anak Jalanan. LSM “Griya Baca” ikut berpartisipasi dalam setiap program kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Adanya kerja sama dengan LSM berarti pemerintah tidak berjalan sendiri dalam program pelatihan anak jalanan.

Adanya hubungan antar sektor ini berarti ke arah konsep *good governance*.

Governance melibatkan tidak hanya negara saja melainkan sektor lain yaitu sektor privat (swasta) dan masyarakat (bisa diwakili oleh LSM). Berdasarkan dimensi



distribusi kekuasaan, *governance* dicirikan dengan rendahnya dominasi negara, dipertimbangkannya kepentingan masyarakat dalam pengaturan kebijakan serta adanya keseimbangan atau simbiosis antar aktor.. Senada dengan pandangan Schwab and Kubler diatas, Stoker dalam kurniawan (2004: 16) mengemukakan 5 (lima) proposisi mengenai *governance* sebagai berikut:

- 1) *Governance* merujuk kepada institusi dan aktor yang tidak hanya pemerintah.
- 2) *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggungjawab dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi.
- 3) *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif.
- 4) *Governance* adalah mengenai *self-governing* yang otonom dari aktor-aktor *Governance* menyadari untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung.

(c) Pola Relasi Pemerintah dengan LSM dalam Program Pelatihan Anak Jalanan

Menurut Afan Gaffar, hubungan antara pemerintah dengan LSM sama sekali tidak dapat dipisahkan. Di negara manapun, pemerintah akan mengakui betapa besarnya peranan LSM dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuktikan betapa pentingnya hubungan keduanya dalam menciptakan kesejahteraan untuk masyarakatnya.

Dalam konteks hubungan LSM dengan pemerintah menurut James V. Ryker, dari kelima model hubungan antara pemerintah dengan LSM ada satu model hubungan yang cocok untuk menggambarkan pola hubungan antara pemerintah dengan LSM dalam Program Pelatihan anak jalanan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bersifat *collaboration/cooperation*, dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan

kalangan LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan. LSM dan pemerintah berdiri pada posisi yang equal dan sejajar.

Hubungan ini umumnya dilaksanakan oleh LSM-LSM dengan ruang lingkup kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat. Wujud kerjasama antara LSM dengan pemerintah antara lain dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, seminar dan kegiatan lain yang sifatnya meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara pemerintah dengan LSM dalam program pelatihan anak jalanan. Disini pemerintah oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang sedangkan LSMnya wakili oleh beberapa LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan anak jalanan dan merupakan *partner* dari pemerintah yaitu, (1) Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKTI), Jl Blitar No.12 Malang, (2) Griya Baca, Jl Kyai Tamin 1C/20,(3) LSM Sadar Hati, Jalan Simping Barito I/2 Malang, (4) LSM SPJM, Jalan Muharto Gang VB Malang.”.

Keempat LSM yang bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang ini ditinjau dari model hubungan antara Pemerintah dengan LSM menurut Philip Eldridge (dalam Corrothers and Suryatna, 1995), dilihat dari dimensi orientasi LSM dalam melakukan kegiatannya yaitu bersifat *High Level Partnership: Grassroots Development* dan *Empowerment at the Grassroots*.

Ketiga LSM masuk dalam kategori *High Level Partnership: Grassroots Development* dikarenakan LSM ini masuk dalam kategori yang prinsipnya sangat partisipatif, terus ikut serta dalam kegiatan program-program pemerintah dikarena LSM ini merupakan *partner* dari pemerintah. Kegiatan dari LSM ini lebih



diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Sedangkan model

Empowerment at the Grassroots dikarenakan LSM ini cenderung memusatkan perhatiannya pada usaha untuk memberdayakan masyarakat, terutama pada tingkat bawah. Ini terlihat bahwa orientasi dari ketiga LSM ini lebih cenderung pada anak jalanan yang merupakan kalangan tingkat bawah yang patut untuk diberdayakan dan disejahterakan.

Dalam pola relasi bersifat *collaboration/cooperation* akan terjadi apa yang dinamakan “kemitraan”. Bentuk kerja sama dalam pola ini diaplikasikan dalam hal kemitraan yang lebih menguntungkan pihak satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial bermitra dengan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) sebagai pelaksana dan penyelenggara program pelatihan yang telah dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Sulistiyani, 2004:129) :

- 1) Ada dua pihak atau lebih
- 2) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- 3) Ada kesepakatan
- 4) Saling membutuhkan

Dilihat dari bentuk hubungan program pelatihan anak jalanan ini sudah terlihat bahwa program ini berbentuk kemitraan. Dilihat dari persyaratannya, pertama ada dua pihak atau lebih yaitu ada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan LSM dibidang Pemberdayaan anak jalanan. Yang kedua, adanya kesamaan visi dalam pencapaian tujuan yaitu sama-sama ingin memberdayakan anak jalanan supaya anak jalanan bisa hidup mandiri dan tidak lagi hidup dijalan untuk mencari nafkah. Yang ketiga, untuk kesepakatan bisa

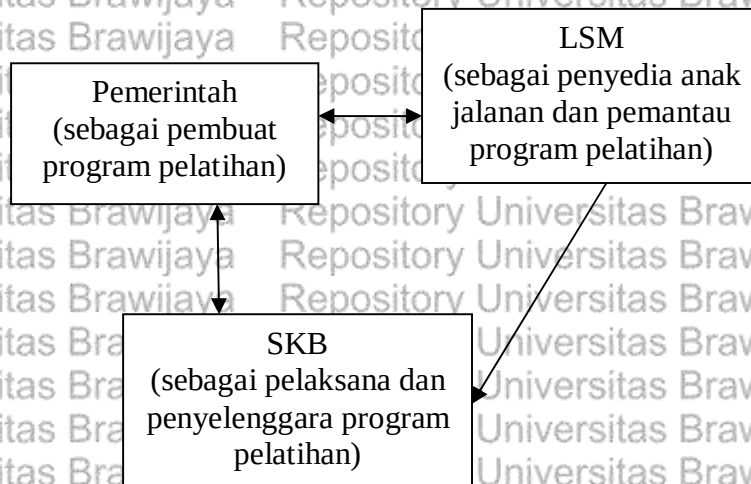


terjadi secara lisan maupun tulisan, ini dikarenakan untuk beberapa instansi ada yang kerjasama secara lisan terus bekerja sama misalnya yang terjadi pada antara Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan instansi dari pemerintah sehingga tanpa ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan antara Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dengan LSM juga tidak ada perjanjian secara tertulis hanya secara lisan saja, dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh LSM yang akan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Yang keempat, semua yang berada dalam program ini semuanya saling membutuhkan antar satu dengan yang lain jika tidak saling membutuhkan maka tidak akan terjadi kemitraan. Tidak mungkin menangani anak jalanan hanya pemerintah saja. Masalah sosial bukan tanggung jawab pemerintah dan jangan dibebani dengan pemerintah. Masyarakat juga berperan dalam hal ini seperti yang telah diungkap oleh Kepala Bidang Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.

Pola relasi antara Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang dan LSM dapat digambarkan melalui gambar berikut :

Gambar 6

Alur Pola Relasi



Keterangan gambar

↔ : ada hubungan timbal balik

→ : hubungan bersifat satu arah

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Dalam hubungan tiga dimensi kemitraan ini setiap sektor memiliki peran sendiri-sendiri. Pemerintah lebih banyak berperan pada penentu rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada peran pengambil keputusan dan pendanaan. Sedangkan swasta lebih banyak pada implementasi penentuan langkah/*policy action* bersama masyarakat.

Secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, *monitoring* maupun evaluasi. Program pembinaan keterampilan anak jalanan ini peran pemerintah lebih cenderung sebagai penentu rambu-rambu dan aturan main yaitu dengan cara membuat sebuah program kerja yang mengikut sertakan semua pihak. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial hanya sebagai pembuat program kerja yang selanjutnya berkerjasama dengan sektor



lainnya. Untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bentuk partisipasinya lebih pada penyelenggara maupun pelaksana program yang telah dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Yang menyelenggarakan pelatihan, keterampilan dan diklat adalah SKB, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial hanya sebagai panitianya saja. Instruktur pengajar, sarana dan prasarana serta fasilitas yang mempunyai adalah SKB. LSM disini berfungsi sebagai penyedia anak jalanan, yang menseleksi anak jalanan yang berhak mengikuti pelatihan adalah LSM tersebut. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial yang menunjukkan LSM mana saja yang diikuti sertakan dalam program ini. Peran pemerintah dalam program pelatihan anak jalanan sangat mendominasi sekali, ini terlihat dari betapa sedikitnya peranan LSM dalam program pelatihan ini. LSM hanya berperan sebagai penyedia dan penseleksi anak jalanan. LSM tidak diikuti sertakan dalam proses pembuatan kebijakan program pelatihan anak jalanan ini. Peran partisipasi LSM dalam proses tidak ada dikarenakan pemerintah tidak ada inisiatif untuk mengikut sertakan LSM dalam proses pembuatan kebijakan program pelatihan anak jalanan. LSM disini hanya sebagai pelaksana di tahap implementasi program pelatihan anak jalanan. LSM harus mengikuti format yang telah direncanakan oleh pemerintah dan mau-tidak-mau LSM harus mengikutinya. Faktor dominasi pemerintah inilah seakan pemerintah merupakan *single fighter* dan LSM berposisi sebagai objek penerima yang harus mau diintervensi, tanpa diberi ruang untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan sebuah kebijakan. Karl Jackson dalam Gaffar (1999:217) menyatakan kebijaksanaan publik dalam proses pembentukan agenda dan formulasi kebijaksanaan, merupakan domain sejumlah



kecil elite yang ada. Sebaliknya warga masyarakat yang diwakili oleh LSM mengalami alienasi dalam proses itu. Namun, kalau sudah sampai tahap implementasi kebijaksanaan tersebut, rakyat diwajibkan untuk terlibat. Pemerintah merupakan pemegang dan penentu agenda publik dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah hampir tidak mendengar apa yang berkembang dalam masyarakat.

Gambar 7

Proporsi Peran Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan



Sumber: Hasil Olah Peneliti

Gambar di atas dijelaskan, lingkaran utuh diibaratkan sebagai Program Pelatihan Anak Jalanan. Yang berwarna biru adalah peran Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, yang berwarna merah adalah peran Sanggar kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang dan yang berwarna hijau adalah LSM. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya betapa besarnya dominasi pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dan SKB Kota Malang dalam Program Pelatihan Anak Jalanan.

2. Program Pelatihan Anak Jalanan

Dalam mengelola suatu kegiatan pelatihan, Ii wahyudin (2003:21) mengemukakan 4 (empat) tahap yang harus ditempuh yaitu: “Tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi (hasil). Dalam analisis ini, peneliti mengambil sesuai dengan fokus yaitu hanya tiga tahap yaitu



tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan hasil pelatihan. Ketiga tahap ini diuraikan secara rinci di bawah ini.

(a) Proses Perencanaan Program Pelatihan Anak Jalanan

Setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, proses perencanaan merupakan persyaratan yang mutlak, karena tanpa perencanaan sulit bagi penyelenggara kegiatan untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Begitu pula halnya program pelatihan anak jalanan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial

Kota Malang yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang.

Bila merujuk kepada langkah-langkah perencanaan pelatihan yang telah dikemukakan pada Tinjauan Pustaka di Bab 2 yang terdiri dari lima langkah kegiatan yaitu identifikasi kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan peserta, mendesain program dan merancang kurikulum dan silabus, ternyata langkah-langkah perencanaan yang dilakukan oleh SKB Kota Malang sebagai pelaksana program pelatihan belum sepenuhnya mengikuti langkah-langkah perencanaan yang diharapkan dalam penyelenggaraan waktu pelatihan.

Langkah pertama dari perencanaan adalah mengidentifikasi pelatihan, dalam mengidentifikasi pelatihan anak jalanan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sebagai perencanaan program bekerjasama dengan LSM pada saat merekrut peserta didik di beberapa LSM di Kota Malang dimana identifikasi ini bersifat individual. Peserta didik akan dipilih oleh koordinator LSM masing-masing siapa saja yang mengikuti pelatihan dan apakah anak jalanan tersebut tertarik dan berminat untuk mengikuti pelatihan. Dengan cara demikian, beranggapan bahwa



calon peserta didik membutuhkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.

Langkah kedua dari penyelenggara pelatihan adalah merumuskan tujuan pelatihan, penyelenggara (SKB Kota Malang) tidak merumuskan tujuan pelatihan secara khusus, melainkan telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang sebagai pembuat program yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mensosialisasikan program pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial dan ketrampilan bagi Anak Jalanan oleh UPT Sosial Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.
- 2) Meningkatkan ketrampilan dan kemauan bekerja bagi Anak Jalanan agar mempunyai nilai tambah, dan mereka dapat berfungsi secara fajar, positif dan normative serta produktifitas di keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- 3) Mengurangi jumlah PMKS khususnya Anak Jalanan di Kota Malang dengan memberdayakan mereka dan, memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup mandiri mereka.
- 4) Memberikan pelatihan bagi Anak Jalanan agar mereka mempunyai ketrampilan khusus yang diharapkan dapat digunakan untuk mencari kerja ataupun membuka lapangan usaha sendiri sehingga mereka bisa hidup lebih mandiri.



- 5). Dengan bantuan stimulan yang akan diberikan, diharapkan para peserta pelatihan akan membuka lapangan usaha sendiri baik secara mandiri atau kelompok.

Tujuan-tujuan tersebut di atas telah ditetapkan secara baku, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang hanya melaksanakan kegiatan pelatihan berdasarkan rambu-rambu dari Dinas Ketenagakerjaan Sosial, dalam rangka mencapai tujuan. Begitupun peserta didik tidak diikutsertakan dalam merumuskan tujuan pelatihan. Dengan kata lain Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini merupakan tugas rutin dari pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang) yang dilaksanakan setiap tahun.

Langkah ketiga dari penyusunan perencanaan adalah menentukan peserta didik. Dalam merekrut peserta didik merupakan tugas Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yang bekerjasama dan berkoordinasi dengan LSM sebagai penyedia anak jalanan yang dibina oleh LSM tersebut. Disini Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Malang hanya sebagai penyelenggara pelatihan. Dalam merekrut calon peserta didik ada beberapa persyaratan yang ditetapkan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yaitu:

- 1) Harus warga Kota Malang yang bisa dibuktikan dengan KTP atau KK
- 2) Umur berkisar antara 14-20 tahun.

Langkah keempat dari perencanaan pelatihan adalah mendesain program. Dalam mendesain program pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota

Malang telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti merumuskan tujuan yang dapat diukur walaupun telah dirumuskan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, pemilihan materi yang cocok dengan tujuan lembaga dan peserta pelatihan, dan rencana evaluasi pelaksanaan pelatihan. Dalam mengevaluasi program pelatihan, penyelenggara (SKB) hanya mengevaluasi hasil pelatihan dilihat dari penilaian peserta pelatihan dengan melalui tiga tahap penilaian yaitu penilaian awal (*pre test*), penilaian proses (*process test*) dan penilaian akhir (*post test*).

Langkah kelima dari perencanaan pelatihan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan. Dalam hal ini penyelenggara (SKB Kota Malang) telah menyusun kurikulum dan silabus dari ketiga pelatihan itu yaitu pelatihan otomotif, pelatihan elektronika, dan pelatihan mengemudi. Dalam penyampaian materi pelajaran yang telah dituangkan dalam kurikulum, penyelenggara maupun tutor/instruktur akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan kerja kelompok. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nanti adalah berupa media cetak, seperti buku, media gambar/bagan dan alat berat lainnya, seperti mesin mobil dan motor, Televisi dan dengan seperangkat komponennya.

(b). Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan

Berbicara mengenai proses pelaksanaan pelatihan, disini peneliti akan membahas sekitar teknik, metode dan media pembelajaran dan pelatihan yang digunakan oleh instruktur baik di dalam kelas maupun di luar kelas.



Seperti telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa instruktur pada saat proses pembelajaran umumnya menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan metode Tanya jawab. Setelah instruktur menjelaskan materi pembelajaran dengan ceramah, tidak semua peserta didik sekaligus mengerti dan memahami apa yang diceramahkan, untuk menghindari adanya peserta didik yang tidak mengerti dan memahami terhadap materi yang disampaikan, maka instruktur memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, kemudian dijawab dan dijelaskan kembali oleh instruktur. Dengan kedua metode ini peserta didik lebih dapat mengerti dan memahami apa yang dijelaskan oleh instruktur. Untuk lebih memantapkan proses pembelajaran dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar maka instruktur menggunakan alat bantu (media) pembelajaran berupa gambar, chart, skema tentang pelatihan. Dengan alat dan media ini yang relevan dan memadai peserta didik lebih antusias dan aktif dalam belajar. Menurut Gagne bahwa “apa yang dilihat dan dilakukan oleh siswa dalam belajar, lebih bermakna dari pada apa yang hanya dilihat saja.”

Setelah instruktur menyampaikan materi pembelajaran/pelatihan yang bersifat teoritis, maka instruktur membawa peserta didik ke tempat praktek.

Dengan menggunakan metode demonstrasi ini peserta didik dapat dengan jelas melihat dan memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh instruktur.

Demonstrasi kadang-kadang dilakukan beberapa kali sehingga peserta didik dapat melaksanakan apa yang telah dipertunjukkan cara-cara memperbaikinya, maka instruktur memerintahkan peserta didik secara berkelompok untuk melakukan praktek pelatihan, sampai peserta didik mahir melakukan pekerjaan dikemudian

hari. Pada saat peserta didik melakukan raktek selalu diawasi dan dibimbing oleh instruktur, agar peserta didik tidak melakukan kesalahan yang fatal, dan dapat membahayakan keselamatan diri peserta didik.

Dari uraian tersebut di atas, didapatkan kesimpulan bahwa, metode dan teknik pembelajaran dan pelatihan yang digunakan oleh instruktur dan upaya membelajarkan peserta didik semaksimal mungkin adalah dengan menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan metode Tanya jawab untuk materi yang bersifat teoritis. Sedangkan untuk menyampaikan materi yang bersifat praktek menggunakan metode demonstrasi yang dilanjutkan dengan metode kerja kelompok.

Dengan metode teknik pembelajaran tersebut di atas, maka pelaksanaan program pelatihan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sekaligus dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(c) Hasil Pelaksanaan Program Pelatihan Anak Jalanan

Dilihat dari data yang telah diperoleh hasil program pelatihan anak jalanan ini memperoleh beberapa hal seperti berikut:

Secara keseluruhan anak jalanan memperoleh dasar-dasar Keterampilan Mengemudi, Elektronika, dan Otomotif. Dengan ketrampilan tersebut, anak jalanan memiliki modal dasar untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan dan langsung melaksanakan kegiatan praktek yang nantinya mereka mampu bekerja ataupun membuka usaha sendiri sehingga mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka dan tidak akan tergantung lagi dengan orang lain. Sebelumnya



anak jalanan tidak mempunyai keterampilan apapun sehingga jalan satu-satunya hanya mencari nafkah di jalan sepertiin mengamen, meminta-minta dan lain-lain.

Dalam mengikuti program pelatihan ini anak jalanan mendapatkan media dalam menunjang proses pelatihan anak jalanan. Untuk pelatihan Otomotif diikuti sebanyak 50 Anak Jalanan. Peserta pelatihan mendapatkan materi dan perlengkapan alat tulis masing-masing anak sebanyak 1 paket. Peserta pelatihan mendapatkan snack, makan dan minum. Peserta pelatihan mendapatkan uang transport Rp. 25.000,-/hari per anak selama pelatihan. Peserta mendapatkan peralatan praktek pelatihan termasuk tolkit. Peserta mendapatkan bantuan modal kerja sebesar Rp. 1.500.000,-/anak jalanan.

Untuk pelatihan elektronika diikuti sebanyak 25 Anak Jalanan. Peserta pelatihan mendapatkan materi dan perlengkapan alat tulis masing-masing anak sebanyak 1 paket. Peserta pelatihan mendapatkan snack, makan dan minum. Peserta pelatihan mendapatkan uang transport Rp. 20.000,- per anak selama pelatihan. Peserta mendapatkan peralatan praktek pelatihan termasuk tolkit.

Untuk pelatihan mengemudi diikuti sebanyak 45 Anak Jalanan. Peserta pelatihan yang mendapatkan SIM A sebanyak 17 Anak Jalanan. Peserta pelatihan mendapatkan uang transport Rp. 17.500,-/hari per anak selama pelatihan. Peserta mendapatkan snack, makan dan minum.

Dalam pelatihan otomotif dan pelatihan elektronika semua peserta didik dinyatakan lulus tetapi dalam pelatihan mengemudi yang lulus hanya 17 orang dikarenakan adanya kecurangan oleh peserta didik dimana ada pergantian peserta didik yang tidak diketahui oleh panitia.



Dilihat dari hasil pelaksanaan program pelatihan anak jalanan setelah pelatihan dijalani. Dari segi pelaksanaan bisa dikatakan berhasil, tetapi dari segi setelah program pelatihan usai tidak begitu berhasil karena setelah pelatihan tersebut anak jalanan yang telah dilatih tetap kembali ke jalan dan tidak menggunakan atau memanfaatkan keterampilan yang telah diberikan pada kegiatan program pelatihan anak jalanan.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani jalanan sudah benar tapi sayangnya pemerintah disini kurang tahu program pelatihan apa yang dibutuhkan oleh anak jalanan sehingga program itu bisa bermanfaat bagi anak jalanan. Tidak adanya kerjasama antar sektor setelah pelatihan itu selesai membuat program pelatihan ini tidak bermanfaat apa-apa bagi anak jalanan yang ikut pelatihan. Seharusnya setelah pelatihan ini Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial bekerjasama dengan perusahaan atau tempat-tempat kerja yang lain agar anak jalanan yang telah mengikuti program pelatihan dipekerjaan disitu. Kalau hanya berupa pelatihan saja maka tidak akan berdampak banyak bagi anak jalanan yang telah dibina.

Salah satu yang membuat program pelatihan tidak membawa dampak lebih adalah *mindset* anak jalanan. *Mindset* anak jalanan adalah menghasilkan uang dengan cara cepat. Perubahan *mindset* sangat diperlukan, harus ada program untuk mengubah *mindset* anak jalanan kearah yang lebih baik, sehingga pikiran anak jalanan bisa terbuka dan tidak lagi kembali ke jalan untuk mencari uang.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka pada bagian ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang peneliti amati selama ini serta memberikan saran atau masukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran pemerintah dalam pembinaan anak jalanan berpedoman pada UUD 1945 serta UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pembinaan anak jalanan ini pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial) membuat program pelatihan jalanan yang dimasukkan dalam renstra.
2. Dalam pembinaan anak jalanan, pemerintah bukan merupakan salah satu aktor saja. Disini diperlukan peran LSM dalam melakukan pembinaan anak jalanan. Ini tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang membebaskan kepada beberapa pihak untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan.
3. Konteks pola relasi yang terjadi antara pemerintah dengan LSM bersifat *collaboration/cooperation*, dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah menganggap bahwa bekerja sama dengan kalangan LSM



merupakan sesuatu yang menguntungkan. Dalam pola relasi bersifat *collaboration/cooperation* akan terjadi apa yang dinamakan “kemitraan”.

Bentuk kerja sama dalam pola ini diaplikasikan dalam hal kemitraan yang lebih menguntungkan pihak satu dengan yang lainnya. Meskipun ada kerjasama disini peran pemerintah sangat dominan sekali dalam program pelatihan anak jalanan sedangkan LSM hanya sebagai partisipan tanpa diikut sertakan dalam pembuatan program pelatihan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah.

4. Setiap program pasti ada syarat mutlak yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan program pelatihan anak jalan terbagi menjadi beberapa langkah yaitu mengidentifikasi pelatihan, merumuskan tujuan pelatihan, menentukan peserta didik, dan mendesain program pelatihan.

5. Dalam proses pelaksanaan pelatihan anak jalanan, lebih membahas sekitar teknik, metode dan media pembelajaran dan pelatihan yang digunakan oleh instruktur, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. proses pembelajaran umumnya menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan metode Tanya jawab.

6. Hasil pelaksanaan program pelatihan anak jalanan mendapati bahwa untuk pelatihan otomotif dan elektronika semua peserta didik dinyatakan lulus semua dan hanya pelatihan mengemudi yang hanya lulus 17 orang. Dalam pelatihan setiap peserta didik diberikan uang transport, makanan, peralatan praktek pelatihan, serta modal usaha.



B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terdiri dari beberapa aspek.

1. Sebaiknya, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dalam membuat program pembinaan anak jalanan harus berkonsultasi dulu atau lebih mengikut sertakan LSM dalam membuat sebuah program pembinaan anak jalanan . Disamping itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang harus mencari model pelatihan lagi yang cukup efektif supaya anak jalanan ini tidak lagi turun ke jalan.
2. LSM disini harus lebih berperan serta dalam program-program yang dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dan ikut berperan lagi dalam menentukan program-program itu karena LSM lebih tahu apa yang baik bagi anak jalanan ke depannya sehingga program-program yang telah dibuat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang bisa berjalan secara efektif. Mereka perlu badan hukum yang bisa melindungi, khususnya penanganan anak jalanan dengan menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang anak jalanan sebagai implementasi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, seperti tentang peraturan teknis pelaksana, koordinator, monitoring dan evaluasi penanganan anak jalanan serta tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
3. Harus ada kerjasama antar sektor dalam melakukan pembinaan anak jalanan. Bukan hanya Pemerintah dan LSM saja tetapi juga semua sektor



ikut berperan dalam pembinaan anak jalanan supaya pembinaan tersebut bisa berhasil dan memberikan dampak yang lebih baik bagi anak jalanan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit

Anwari, WMK. 2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Departemen Sosial RI.1999. *Pedoman pembinaan kesejahteraan sosial anak dini usia*. Jakarta : Direktorat KAKLU

Dewi, E.A.S. 2004. *Efektivitas manajemen sistem pembinaan anak jalanan di kota Bandung*. Tesis Master Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia.

Dharma, A. 1998. *Perencanaan Pelatihan*. Jakarta: Pusdiklat Depdikbud

Fanggidae, Abraham. 1993. *Memahami Masalah Sosial*. Jakarta: Puspaswara

Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka

Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Cetakan kedua. Jakarta:LP3ES.

Ishak, M. 2000. *Perkembangan Model Program Pendidikan Taruna Mandiri: Studi Terfokus pada Kehidupan Anak-anak Jalanan di Bandung*. Disertasi Doktor. Universitas Pendidikan Indonesia.Jakarta:Ghalia Indonesia.

Keban, Yeremias T. 2008. *6 Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Gava Media

Korten, David C. 1993. *Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.

Kurniawan, teguh. 2007. *Pergeseran Paradigma Administrasi Publik : Dari perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance*, JIANA Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 ISSN. 1411- 948X, No. 52-70, Januari



Marzuki, S. M. 1992. *Strategi dan Model Pelatihan, Suatu Pengetahuan Dasar Bagi Instruktur dan Pengelolaan Lembaga Latihan, Kursus dan Penataran*. Malang : Jurusan PLS-FIP-IKIP.

Matthew, Miles. B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia

Moedjiono dan Dimiyati, M. (1992). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Depdikbud.

Moleong, Lexy.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Nawawi dan Martini. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan ketiga. Yogyakarta :UGM Universitas Gadjah Mada.

Nazir, Moh. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indah.

Nurhadjatmo, Wahyu. 1999. *Seksualitas Anak Jalanan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.

Odi, Solahudin. 2000. *Anak Jalanan Perempuan*. Semarang: Yayasan Setara

Poerwandari, Kristi. 1998. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.

Siagian, S.P. (1998). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Silya, T.L. 1996, *Community mobilization for the protection and rehabilitation of street children. Proceedings International Conference on Street Children*, hlm. 5 - 18.

Simamora, H. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIEYKPN.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Metode R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi : Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.



Sumantri, S. 2001. *Pelatihan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Bandung: UNPAD.

Yin, R.K. 2002. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.

Perundang-Undangan:

SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang No. 108 Tahun 1984 tentang pembentukan Tim Rehabilitasi dan Pencegahan WTS di kotamadya Malang

SK Walikota No. 317 tahun 2005 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Website:

Fickar Hadjar, Abdul. *LSM Demokrasi dan Demonstrasi*. Diakses tanggal 10 Februari 2011 dari <http://fickar15.blogspot.com/2006/07/lsm-demonstrasi-demokrasi.html>

Kompas 13 Januari 2003, *NGO ditengah Kepungan Kepentingan Global*, di akses tanggal 03 Februari 2011 dari <http://lafadl.wordpress.com/2006/07/15/ngo-di-tengah-kepungankepentingan-global/>

Lubis, Paramita Fithrianida. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan diKota Medan (Studi Kasus Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan)*. Diakses pada tanggal 25 Maret 2011 dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19385>

Munir, Abdul. 2010. *Masalah Anak Jalanan*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2010 dari <http://www.scribd.com/doc/15238608/Masalah-Anak-Jalanan>

Naim, Agus. 2010. *Peta Masalah Anak Jalanan*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2010 dari <http://www.scribd.com/doc/17210103/Peta-Masalah-Anak-Jalanan>

Panimbang, Fahmi. 2011. *LSM dan Lemahnya Akuntabilitas Mereka*. di akses tanggal 05 Maret 2011 dari



<http://indoprogress.blogspot.com/2006/09/Ismdanlemahnyaakuntabilitasmereka.html>

Situs resmi Pemerintah Kota Malang <http://www.malangkota.go.id> di akses tanggal 12 Januari 2011

Suacana, I Made Wayan Gede, 2011. *Teori Organisasi Dan Manajemen Dalam Sektor Publik*. Diakses pada tanggal 18 Maret 2011 dari <http://teknikkepemimpinan.blogspot.com/2011/02/anggota-yakuza-ada-di-indonesia.html>